

**NETRALITAS DAN INDEPENDENSI SURAT KABAR HARIAN LAMPUNG
POST DAN RADAR LAMPUNG DALAM PEMBERITAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

(Skripsi)

Oleh :
Rizka Fajrianti



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABTRACT

NEUTRALITY AND INDEPENCY OF DAILY NEWSPAPERS LAMPUNG POST AND RADAR LAMPUNG IN REPORTING MAJOR ELECTION IN BANDAR LAMPUNGIN 2015

BY:

RIZKA FAJRIANTI

This research is based on the demands of mass media to become neutral and independent in reporting local election campaigns in 2015. Reality showed that during the local elections period mass media tend to be biased by political interests and support some specific political interests. The goal in this research is to see the neutrality and independency of daily newspapers Lampung Post and Radar Lampung in reporting Major Elections in Bandar Lampung in 2015. The analysis method used in this research is content analysis because of the objective characteristic which is suitable to be used to see the comparison of both medias. The result showed that both daily newspapers tend to be used see the comparison of both media. There are 70 political news in Lampung Post and 62 political news in Radar Lampung that was observed in this research. Based on six indicators used in this research, there are 52,8% personalization in Lampung Post and 70,96% personalization in Radar Lampung, 32,8% sensationalism in Lampung Post and 62,9% sensationalism in Radar Lampung, 40% stereotype in Lampung Post and 46,7% stereotype in Radar Lampung, 18,57% juxtaposition/linkages in Lampung Post and 29,032% juxtaposition/linkages in Radar Lampung. Meanwhile, there are 98,5% balancy and accuracy in Lampung Post and 95,16% in Radar Lampung. Beside that, in separation of fact and opinion category both of newspapers showed that there are 0% mixing of fact and opinion during reporting local election campaigns in 2015. Based on the data showed that Lampung Post is better than Radar Lampung in applying the neutrality and independency.

Keywords: Neutrality and independency, major election reports.

ABSTRAK

NETRALITAS DAN INDEPENDENSI SURAT KABAR HARIAN LAMPUNG POST DAN RADAR LAMPUNG DALAM PEMBERITAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

OLEH:

RIZKA FAJRIANTI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan media massa agar bersifat netral dan independen dalam pemberitaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Realitas menunjukkan bahwa media massa pada pemilihan kepala daerah cenderung bias kepentingan politik dan memihak kepada kepentingan politik tertentu. Tujuan penelitian ini untuk melihat netralitas dan independensi surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung dalam pemberitaan pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi karena sifatnya yang obyektif sehingga tepat digunakan untuk melihat perbandingan dari kedua media. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua surat kabar harian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan tidak netral dan independen. Berita politik seputar pemilihan kepala daerah pada Surat Kabar Harian Lampung Post sebanyak 70 berita dan Surat Kabar Radar Lampung sebanyak 62 berita yang diteliti. Berdasarkan enam indikator yang digunakan, yaitu personalisasi pada Lampung Post sebanyak 52,8% dan Radar Lampung sebanyak 70,96%. Sensasionalisme pada Lampung Post sebanyak 32,8% dan Radar Lampung sebanyak 62,9%. *Stereotype* pada Lampung Post sebanyak 40% dan Radar Lampung sebanyak 46,7%. *Juxtaposition/linkages* pada Lampung Post sebanyak 18,57% dan Radar Lampung sebanyak 29,032%. Selain itu, keberimbangan dan akurasi terdapat 98,5% pada Lampung Post dan 95,16% di Radar Lampung. Sementara pada kategori pemisahan fakta dan opini, kedua surat kabar menunjukkan tidak ada percampuran fakta dan opini yaitu sebanyak 0%. Berdasarkan hasil koding menunjukkan Lampung Post lebih baik dibandingkan Radar Lampung dalam menerapkan netralitas dan independensi.

Kata kunci: Netralitas dan independensi, Pemberitaan pemilihan walikota.

**NETRALITAS DAN INDEPENDENSI SURAT KABAR HARIAN LAMPUNG
POST DAN RADAR LAMPUNG DALAM PEMBERITAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

Oleh :
Rizka Fajrianti

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

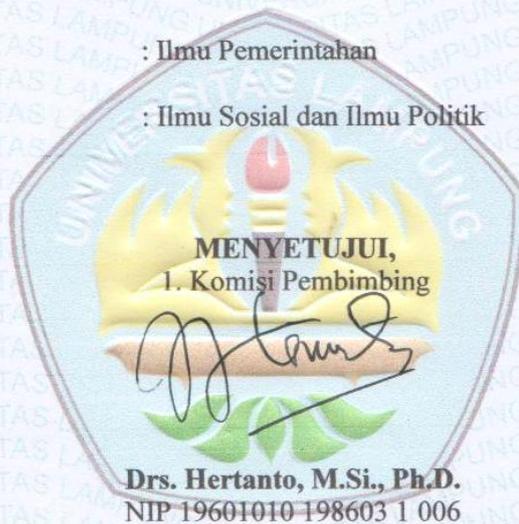
Judul Skripsi : **NETRALITAS DAN INDEPENDENSI SURAT KABAR HARIAN LAMPUNG POST DAN RADAR LAMPUNG DALAM PEMBERITAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : *Rizka Fajrianti*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1216021097

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Sigit Krisbintoro

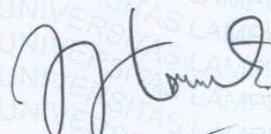
Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

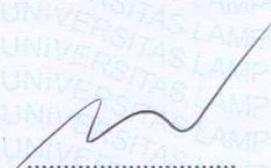
: **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Penguji

Bukan Pembimbing

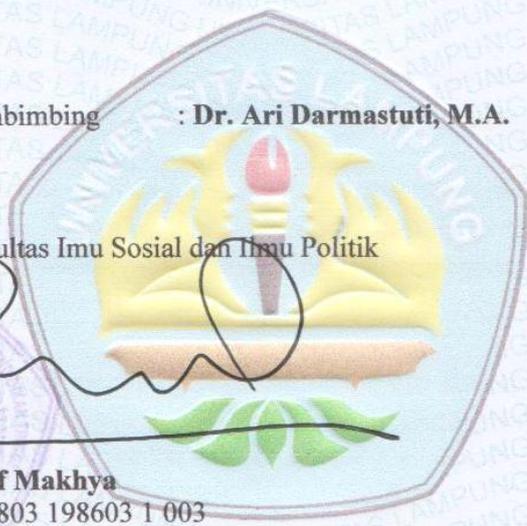
: **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Januari 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Rizka Fajrianti
Rizka Fajrianti
NPM. 1216021097

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada 3 Maret tahun 1994 sebagai putri pertama dari lima bersaudara pasangan bapak Hilal Mubarak dan ibu Muhimatussalimah. Masa pendidikan penulis dimulai dari tamatan SD Muhammadiyah Waringin Sari Barat tahun 2006, SMP Negeri 1 Pringsewu tahun 2009, dan SMA Negeri 2 Pringsewu tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur PMPA pada tahun 2012. Selama kuliah penulis aktif di beberapa organisasi internal kemahasiswaan yaitu FSPI Fisip Unila sebagai Sekertaris Danus tahun 2013-2014, FSPI Fisip unila sebagai Bendahara Umum tahun 2014-2015, Staff BKPM Birohmah Unila tahun 2014-2015, dan Asisten Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Lampung tahun 2015-2016. Penulis juga aktif mengikuti organisasi eksternal kampus dan pernah menjabat sebagai sekretaris Bidang Kominfo KAMMI Unila tahun 2013-2014. Sejumlah pengalaman selama di perkuliahan, penulis pernah terlibat dalam penelitian tentang *Indeks Governance Indonesia* dari Kemitraan Jakarta di Lampung Barat Tahun 2014. Relawan Bawaslu tahun 2014. *Surveyor* pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung dan *entry data* Sidalih tahun 2015, dan *Real count* Partai Golkar dalam Pilkada di Kabupaten Pringsewu tahun 2014. Beberapa prestasi juga pernah di torehkan selama duduk dibangku kuliah yaitu, Juara 1 Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Regional Sumatera di Sumatera Utara Tahun 2015, Juara 1 Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Provinsi Kantor Balai Bahasa Provinsi Lampung tahun 2015, Juara 1 Lomba menulis kisah inspirasi Ramadhan FSPI FISIP UNILA tahun 2014, dan Peserta terbaik LKMITD Universitas Lampung tahun 2014. Sebuah karya yang ditulis bersama rekan-rekan di Lapolokda FISIP Unila juga pernah diterbitkan dalam buku berjudul "Sukses Ala Mahasiswa FISIP".

MOTTO

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhan-mulah yang mulia. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya”. (QS. Al Alaq 1-5)

*Janganlah Kamu Berputus Asa dari Rahmat Allah
Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Semuanya
(QS. Az-Zumar Ayat 53)*

**BUKAN SESUATU YANG MUDAH YANG MENJADIKAN KITA
OPTIMIS, OPTIMISLAH YANG MEMBUAT SEGALA SESUATU
MENJADI MUDAH. (SYD NGETIGING)**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

*Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan*

*Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Semoga Kelak Skripsi ini dapat bermanfaat*

dan

Ku Persembahkan Karya Ini Kepada

Bapak Hilal Mubarak dan Ibu Muhimatussalimah, orang tua yang telah begitu berjasa dalam hidup nanda. Maka hanya Alloh sahaja yang dapat membalasnya.

Untuk semua keluarga, sahabat, dan semua orang yang pernah mengisi episode kehidupan ini saya ucapkan terimakasih.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Netralitas dan Independensi Surat Kabar Harian Lampung Post dan Radar Lampung dalam Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2015**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna., sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dr.Ari Darmastuti, MA selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Roby Cahyadi K. M.As selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua Penulis, selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih banyak untuk semua kata-kata khidmat yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih atas kesediannya berdiskusi untuk membuka pikiran penulis dan menggali potensi Penulis lebih dalam lagi, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Budi Kurniawan, S.IP., M.P.P selaku Ketua Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah FISIP, serta rekan dan sahabatku di Lab. (Melyansyah SA, S. IP, Lintang Yunia Afriana, S. IP dan Ananda Putri, S. IP) yang telah banyak memberikan masukan, dan memotivasi serta seringkali mengajak berdiskusi untuk membuka pikiran Penulis dan menggali potensi Penulis lebih dalam lagi, sehingga Penulis menjadi lebih baik.
7. Bapak Syafarudinselaku Ketua Komunitas Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman dalam bidang kewirausahaan.
8. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

9. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
10. Kedua orang tua saya, Hilal Mubarak dan Muhimatussalimah. Orang yang telah begitu berjasa dalam hidup nanda.
11. Untuk segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materi selama saya menempuh pendidikan, mbah kakung dan mbah putri, Bude dan Pakde, om Ismail dan lek Nia, Om Agus dan Lek Ida, dan Lek Suhan dan Bulek Rizka.
12. Adik-adikku Amalia Ayu Fitriani, Syafrizal Fahmi, Firman Apriansyah dan Fathan Ar Rafif. Terimakasih untuk setiap kebersamaan dimana ada canda, tawa, dan tangis bersama. Mohon maaf untuk setiap pertengkaran kecil yang terjadi. Terkadang diri ini belum bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian. Semoga kita semua bisa meraih sukses di dunia dan akhirat kelak. aamiin
13. Untuk sepupu-sepupuku ada kakak Zikri, kakak Wiwil, Kakak Ridho, Abang Tan, Adek Icut, Adek Zia, Salma, Salwa, Najah, dan Si kecil Brian. Mohon maaf karena sebagai cucu paling tua belum bisa menjadi contoh yang baik. Terkadang suka galak dan cerewet semata karena saya sayang dengan kakak dan adik-adikku.
14. Bocah-bocah langgar yang kini tidak bocah lagi. Mb Khani, Mb Nuni, Bude Iqoh, Venti, Mb Dian, Nasrul, Mas Lukman, dan Pakde Fanani. Saya bersyukur karena di lahirkan di lingkungan yang agamis dan guyub di lingkungan langgar Darul Arqom. Malam hari selepas ngaji kita suka

berkumpul. Ngobrol ngalor ngidul dan diskusi sambil ngelutis. Sesekali kita buat acara untuk meramaikan masjid dan mengisi liburan adik-adik santri. Dari hal sederhana tersebut pikiran saya tergugah untuk bisa memberikan kontribusi untuk agama, diri, keluarga, dan masyarakat.

15. Untuk para guru ngaji ada Pakde Umam, Ustad Sodikin, Mas Irfa, Mb Isti, Bude Bibah, Mb Yos, Mb Dwi, Mb Yuli, Mb II, Umi Hufaz, Umi Jua, dan Umi Prihatin. Semoga Alloh membalas kebaikan kalian.
16. Bapak ibu guru di SD Muhammadiyah Waringin Sari Barat. Ibu Iel, Ibu Siti Rohmah, Ibu Yatmi, Ibu Silas, Pak Sugi, Pak Salamun dan Ibu Kom.
17. Bapak ibu Guru di SMP, Bapak Sumitro, Ibu Netra, pak Ngadiman (alm), dan segenap guru di SMP Negeri 1 Pringsewu.
18. Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 2 Pringsewu. Bapak Suyadi, ibu Delmiza, Pak Suropto (alm), bunda Erlina bapak ibu pembina osis dan pembina rohis.
19. Sahabat tercinta Kiki, Wulan, Herna, Mb Eneng, Mb Widya, Yunda Rova, Mb Marlia, Mb Eva, Mb Evi, Nasira, Maya, Eri, Ananda Putri dan Ubi. Terimakasih telah mau berbagi dalam suka dan duka.
20. Keluarga Besar BEM Universitas Lampung tahun 2015-2016, FSPI FISIP UNILA, dan KAMMI UNILA.
21. Keluarga besar kkn Tanjung Betuah Kecamatan Cukuh Balak Tanggamu. Bapak Hayuza Isma dan Keluarga, Pak Hasan dan Keluarga, ibu-ibu pengajian dan abah. Sahabat seperjuangan Winda, Eka, Pitri, Jim, Andrian, dan Agung. Nikmatnya kekeluargaan dan keindahan panorama alam takkan pernah saya lupakan. Semoga kelak bisa kembali lagi kesna.

22. Sahabat-sahabat di komunitas Pondok Creative Waringin Sari. Jarang ada pemuda- pemuda yang mau tau urusan desa apalagi peduli dengan desanya. Meskipun minim dana tetapi kemaun membuat kita bisa melakukan segalanya.
23. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2012, dan adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga.Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 19 Januari 2017

Rizka Fajrianti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Media Massa	14
B. Media Massa dalam Sistem Politik Demokrasi	22
C. Media Masa dalam Sistem Pemilihan Umum Demokratis	26
D. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	32
E. Konsepsi Netralitas dan Independensi Media.....	34
1. Teori Netralitas dan Independensi Media	34
2. Netralitas Media.....	38
3. Independensi Media	40
4. Netralitas dan Independensi	42
F. Kerangka Pikir	46
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Peneltian	54
B. Metode Penelitian	54
C. Definisi Konseptual	56
D. Definisi Operasional	62
E. Lokasi Penelitian.....	63
F. Populasi dan Sampel	64
G. Unit Sampel	65
H. Teknik Pengumpulan Data.....	66
I. Teknik Analisis Data.....	67
J. Uji Validitas	68
K. Uji Reliabilitas	69

IV. GAMBARAN UMUM

A. Surat Kabar Harian Lampung Post	70
1. Profil Lampung Post	70
2. Lampung Post Media Lokal dan Penunjang Demokrasi di Tingkat Lokal.....	72
B. Surat Kabar Harian Radar Lampung.....	75
1. Profil Radar Lampung.....	75
2. Radar Lampung Sebagai Media Lokal dan Penunjang Demokrasi di Tingkat Lokal.....	77
C. Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah.....	79
D. Netralitas dan Independensi Media dalam Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah.....	82
E. Analisis Isi Netralitas dan Independensi dalam Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Surat Kabar Harian Lampung Post dan Radar Lampung.....	83

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas Netralitas dan Independensi Oleh Para Ahli	90
B. Uji Reliabilitas dan Independensi Surat Kabar Harian Lampung Post dan Radar Lampung dalam Pemberitaan Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2015	94
C. Hasil dan Pembahasan	96
1. Berita kampanye pemilihan walikota Bandar Lampung Tahun 2015	97
2. Pemisahan Fakta dan Opini	100
3. Personalisasi.....	103
4. Sensasionalisme	107
5. <i>Stereotype</i>	109
6. <i>Juxtaposition/linkages</i>	113
7. Keberimbangan dan Akurasi.....	117
D. Analisis Perbandingan Netralitas dan Independensi Surat Kabar Harian Lampung Post dan Radar Lampung dalam Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2015	121

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	124
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Tentang Netralitas dan Independensi Media.....	4
2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu di Provinsi Lampung	11
3. Operasional Variabel.....	62
4. Analisis Isi <i>Reference</i> Netralitas dan independensi Media	86
5. Uji Validitas Indikator Oleh Panel Ahli.....	93
6. Uji Reliabilitas	95
7. Presentase Hasil Koding Surat Kabar Harian Lampung Post	121
8. Presentase Hasil Koding Surat Kabar Harian Radar Lampung	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir.....	53
2. Berita Kampanye Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015	98
3. Pemisahan Fakta dan Opini	100
4. Personalisasi	102
5. Sensasionalisme.....	106
6. <i>Stereotype</i>	108
7. <i>Juxtaposition/Linkages</i>	112
8. Keberimbangan dan Akurasi	117

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Netralitas harus ada dalam pemberitaan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana terdapat dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 Tahun 2015 pasal 52. Pasal tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemberitaan dan penyiaran di media harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalisme (<https://data.kpu.go.id/index.php#> data.kpu.go.id.diakses pada 20 Mei 2016 Pukul 00.10 wib,).

Kode etik jurnalistik memuat ketentuan bahwa media dalam pemberitaannya harus bersikap netral. Etika Jurnalisme bab II juga memuat ketentuan tentang cara pemberitaan. Pada pasal 5 disebutkan bahwa wartawan Indonesia dalam menyajikan berita harus berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta mencampuradukkan fakta dan opini (<http://www.kajian teori.com/2015/02/kode-etik-jurnalistik.html> diakses pada 14 Mei tahun 2016 pukul 22.30 wib).

Pada jurnalisme dan jurnalistik, media bersikap netral dan independen harus ditegakkan. Independen artinya merdeka dalam menjalankan ideologi jurnalisme. Netral diartikan berimbang, akurat, tidak memihak kecuali pada kepentingan umum. Peran media massa netral ditujukan untuk menghindari bias kepentingan politik. Selain itu, media netral merupakan salah instrumen untuk mewujudkan keberadaan media sebagai pilar keempat penopang demokrasi. Media sebagai pilar keempat penopang demokrasi ditunjukkan dengan sikap media sebagai *watch dog* (anjing penjaga) dan sikap media yang mendidik masyarakat melalui informasi yang diberikan.

Bias kepentingan politik media massa terjadi di Indonesia. Sebagaimana dipaparkan dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No, 9 Juni 2014 yang berjudul “Mengungkap Independensi Media”. Sebagian besar media massa di Indonesia kendalikan oleh pemiliknya. Para politisi menggunakan media sebagai alat untuk menyukseskan kepentingan mereka. Seperti yang terjadi di Indonesia, Surya Paloh sebagai pimpinan partai Nasdem sekaligus pemilik Media Group. Aburizal Bakrie sebagai mantan ketua umum partai Golkar sekaligus pemilik Tv One. Dahlan Iskan sebagai mantan pimpinan BUMN dan pemilik Jawa Post. Serta Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua umum partai Perindo dan pemilik MNC Group .

Media-media tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat terutama dalam persepsi politiknya. Tidak berlebihan jika kekhawatiran yang melatarbelakangi media-media tersebut mengganggu netralitasnya karena seperti yang dikemukakan oleh McQuail (2010: 95) bahwa semakin

sempurna monopoli komunikasi massa (melalui kepemilikan banyak media seperti Media Group melalui koalisi merah putih), makin besar kemungkinan perubahan dapat ditimbulkan pada arah yang dikehendaki yaitu kepentingan politik yang menunggangi media.

Semua tokoh tersebut merupakan aktor utama partai politik sekaligus pemilik media. Kecenderungan media sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik terlihat pada massa pemilihan umum presiden dimana semua pemilik media tersebut membuat program seperti kuis interaktif, dan lagu untuk mempromosikan dirinya. Pada akhirnya masyarakat dipengaruhi dengan hal-hal positif (pencitraan) yang dilancarkan melalui media sehingga sulit untuk melihat netralitasnya.

Kasus netralitas juga terjadi pada surat kabar nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (Pers, 2014: 23) menemukan sebanyak 14,29% berita di harian Sindo dari total 35 berita politik yang diteliti, cenderung berpihak kepada kepentingan partai politik atau organisasi massa. Sementara itu, berita demikian juga ditemukan di surat kabar harian Kompas yaitu sebanyak 2,5% dari total 40 berita yang diteliti.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan surat kabar lokal sebagai salah satu informasi utama menjadi sarana yang cukup efektif untuk melancarkan kepentingan politik pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan hasil survey The Asia Foundation (Yusuf, 2011: 305), lebih dari 90% masyarakat menggunakan media sebagai sumber informasi pemilihan umum.

Survey tersebut dijadikan dasar penggunaan media sebagai alat untuk melancarkan kepentingan politik. Meski penggunaan media sebagai alat untuk melakukan komunikasi politik dibolehkan, namun harus sesuai dengan kaidahnya sebagaimana terdapat dalam PKPU No. 7 tahun 2015 dan sesuai dengan etika jurnalisisme yang berlaku.

Pemberitaan seputar kepala daerah yang netral akan membawa manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat akan dapat berfikir secara rasional dalam menentukan pilihannya. Masyarakat akan menimbang mana yang baik dan buruk sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebaliknya, jika media tidak bersikap netral akan membawa kerugian bagi masyarakat. Masyarakat dibohongi dengan citra baik pemberitaan yang jauh dari kenyataan. Hasilnya akan terpilih calon yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian terkait masalah netralitas surat kabar dalam pemberitaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan ini. Penelitian tersebut diantaranya:

Tabel 1. Penelitian Tentang Nealitas dan Independensi Media

Nama	Dhanur Seto (2009)	Dewan Pers volume 9 Juni 2014	Emmy Pontarie (2014)
Judul	Pemberitaan Media Cetak Dalam Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2009 (Studi Analisis Isi Pemberitaan Pemilu Presiden	Mengungkap Independensi Media	Komparasi, Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan, dan Netralitas dalam Pemberitaan (Study Kotnen Analisis Terkait Pemberitaan Pemilu Presiden

	Pada Masa Kampanye di Media Cetak Harian Jogja, Radar Jogja, dan Kedaulatan Rakyat Jogja Edisi Juni- Juli 2009)		2014 di Harian Kompas dan Sindo)
Rumusan Masalah	Apa perbedaan dari segi pemberitaan antara kontestan incumbent dan non- incumbent dalam Pemilu Presiden Tahun 2009?	Bagaimana independensi, netralitas, dan obyektifitas berita terkait dengan pemberitaan politik dan kepemilikan media?	Bagaimana kebenaran, relevansi, keseimbangan, dan netralitas dalam pemberitaan pemilu presiden tahun 2014 pada surat kabar harian Kompas dan Sindo?
Kerangka Teori	Media dapat menyampaikan informasi yang berbeda karena digunakan sebagai saluran komunikator politik. Padahal, kebenaran dan keberimbangan informasi dapat diperoleh dari pemberitaan yang mengedukasi masyarakat.	Prinsip independensi dan netralitas dalam jurnalisme dan jurnalistik. Indikator independensi dan netralitas.	Pemberitaan yang obyektif dalam artian memiliki bentuk yang faktual, akurat, jujur, terhadap realitas, dan mampu memisahkan antara fakta dan opini (MacQuail, 2011: 244)
Metodologi	Deskriptif Kuantitatif	teknik triangulasi	Kuantitatif analisis isi
Hasil	Terdapat perbedaan pola pemberitaan antara kandidat incumbent dan non-incumbent pada pemilihan presiden tahun 2009. Perbedaan pemberitaan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan redaksi dan surat kabar yang diteliti	terdapat pada penelitian kedua adalah media-media yang dimiliki oleh elit politik cenderung digunakan pemilik untuk kepentingan pribadinya ketimbang melayani kepentingan publik. Kebenaran yang dijunjung tinggi	Kategori obyektif disandarkan pada dua dimensi yaitu dimensi faktual dan berimbang. Berdasarkan dimensi faktual, surat kabar Kompas memiliki faktualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat kabar Sindo. Sedangkan, berdasarkan dimensi berimbang, surat kabar Kompas lebih

		dan jurnalisme juga berada pada ancaman serius.	berimbang dibandingkan dengan koran sindo.
--	--	---	--

Sumber: diolah sendiri oleh peneliti

Terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian tersebut. Berdasarkan judul, ketiga penelitian mengacu kepada permasalahan netralitas dan independensi media pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang mengambil tema pada permasalahan netralitas dan independensi media. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari ruang lingkup yang akan dikaji. Ruang lingkup pada permasalahan penelitian ini terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota Bandar Lampung sedangkan pada penelitian sebelumnya terjadi pada Pemilihan Umum untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan rumusan masalah, terdapat perbedaan dan persamaan. Penelitian pertama cenderung fokus dengan masalah kandidat *incumbent* dan *non incumbent*. Penelitian kedua mempertanyakan netralitas dan independensi media pada pemberitaan pemilihan umum dan kepemilikan media, dan pada penelitian ketiga, mempertanyakan relevansi kebenaran, keseimbangan, dan netralitas pada pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian ini memiliki kesamaan pada penelitian tersebut hanya saja yang dikaji lebih sempit yaitu pada konsep netralitas dan independensi media.

Berdasarkan metodologi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisis isi. Pemilihan metode tersebut sama dengan penelitian pertama dan ketiga alasannya adalah karena menggunakan berita sebagai bahan untuk mengamati fenomena politik.

Berdasarkan kerangka pikir, penelitian ini berfokus pada pentingnya netralitas media cetak sebagai salah satu upaya untuk membentuk media yang profesional. Adanya keberadaannya media yang profesional, maka akan tercapai media yang menjadi pilar keempat demokrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert Dahl (Oemar, 2001: 76) dimana peran media yang bebas sebagai *The availability of alternative and independent sources of information*. Peran ini bersinergi dengan prinsip-prinsip *local governance* sejalan dengan prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Keberadaan media yang netral akan memungkinkan adanya demokrasi di tingkat lokal.

Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Berbagai aspek kehidupan memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam setiap kegiatannya, tanpa terkecuali melalui media. Akuntabilitas dan transparansi publik menjadi faktor pemicu partisipasi publik. Konsekuensinya adalah masyarakat dapat turut serta mengawal berjalannya demokrasi sekaligus berpartisipasi dalam mengawal keberadaan demokrasi. Pada penelitian ini, demokrasi dapat terlihat dari media yang memiliki sikap netral dan independen.

Hasil penelitian ini akan digunakan untuk melihat netralitas pemberitaan dari kedua media yaitu Lampung Post dan Radar Lampung. Alasannya adalah fenomena ketidaknetralan surat kabar diindikasikan terjadi di Lampung. Dua diantaranya yaitu surat kabar harian Lampung Post dan surat kabar harian Radar Lampung. Kedua koran tersebut menampilkan rubrik khusus dalam Pemilihan Kepala Daerah di Lampung yaitu Pilkada 2015 pada surat kabar harian Radar Lampung dan Lampung Memilih pada surat kabar harian Lampung Post.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sejak awal tahun 2015 sejumlah calon terlihat memiliki intensitas cukup banyak muncul di kedua media tersebut. Calon-calon banyak didominasi oleh calon petahana seperti yang dilakukan oleh Herman HN dari Bandar Lampung, Rycko Menoza dari Lampung Selatan, Aris Sandi dari Pesawaran, dan sejumlah calon petahana yang ada di Lampung. Kemunculan foto dan pemberitaan, bahkan ucapan selamat seringkali muncul memenuhi halaman kedua surat kabar tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa para calon tengah mempromosikan diri mereka kepada masyarakat.

Surat kabar harian Lampung Post merupakan koran pertama di Lampung. Lampung Post dalam refleksi ke- 41 yang berjudul "Gelang Konvergensi" edisi Minggu, 9 agustus 2015 menyatakan memegang komitmen kerakyatan dan bersikap independen. Adapun terhadap sikap independen Lampung Post, surat kabar ini tidak mengumbar janji bagi kepentingan

bisnis. Lampung Post tetap menjaga kepercayaan serta tidak ingin menjadi alat kepentingan penguasa dan politik tertentu.

Surat kabar ini berkomitmen menghadirkan kebenaran. Dengan demikian, dalam bersikap memberitakan suatu peristiwa, surat kabar harian Lampung Post berpihak pada kepentingan masyarakat. Surat kabar harian Lampung Post dengan *tagline* teruji dan terpercaya membawa kepada komitmen kerakyatan dimana media Lampung Post adalah media yang berpihak kepada rakyat bukan kepada kekuatan politik tertentu.

Keberadaan tajuk tersebut terlihat kontra dengan adanya pemberitaan yang disajikan terutama pada saat momentum pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2014. Kekuatan politik koalisi pimpinan media group telah membawa kepada rekonstruksi berita yang mendukung Jokowi sebagai presiden. Penampilan gambar Jokowi pada salah satu halaman menunjukkan ada upaya mempromosikan sosok Jokowi melalui surat kabar Lampung Post.

Pada pemilihan umum legislatif, surat kabar harian Lampung post memunculkan calon-calon dari Partai Nasdem dalam pemberitaannya. Selain itu, pada saat Pemilihan Gubernur Lampung, surat kabar harian Lampung Post secara terus menerus memuat gambar Ridho Ficardo pada bagian *head line*. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan Lampung Post kepada kepentingan politik tertentu.

Munculnya hal tersebut kontras dengan *tagline* yang diusung oleh surat kabar harian Lampung Post yaitu teruji dan terpercaya yang didalamnya memuat komitmen sikap kerakyatan justru bersikap pada kepentingan politik tertentu. Keberpihakan media terhadap kepentingan politik telah mengurangi esensi dari fungsi media massa yang diantaranya merupakan saluran bagi masyarakat sipil (*free Public Sphere*) sebagai pilar keempat penopang demokrasi.

Keterlibatan pemilik dalam pengeluaran kebijakan pemberitaan terlihat juga di Radar Lampung terutama pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif sebelumnya. Radar Lampung merupakan anak dari Jawa Pos milik Dahlan Iskan. Salah satu konten koran ini memuat kolom Dahlan Iskan dalam bentuk visualisasi gambar. Hal tersebut mengindikasikan ada campur tangan dari pihak pemodal. Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti pada saat pemilihan kepala daerah surat kabar harian Radar Lampung sangat aktif dalam menyuarakan pemberitaan seputar calon yang akan maju pada pertarungan pemilihan kepala daerah serentak di Lampung.

Radar Lampung dalam pemberitaan terkait Pemilihan Walikota Bandar Lampung berdasarkan pengamatan penulis telah beberapa kali menampilkan informasi tentang calon nomor urut 2 dengan pemberitaan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat pada surat kabar harian Radar Lampung edisi 1 Desember 2015 yang mengusung pemberitaan tentang calon nomor urut dua dengan judul berita “Giliran Herman-Yuk Gelar

Sayembara 5 Juta”, Radar edisi 3 Desember 2015 dengan judul berita “Paguyuban Cirebon Dukung Herman-Yuk”.

Penelitian ini menggunakan Kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian karena Bandar Lampung melaksanakan pemilihan serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Selain itu, Kota Bandar Lampung memiliki tingkat partisipasi yang rendah pada pemilihan umum serentak tahun 2014 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya sebagaimana di tunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/ Kota	Pemilihan Gubernur Tahun 2008	Pemilihan Legislatif Tahun 2009	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	Pemilukada Tahun 2010	Pemilukada Tahun 2011
1	Bandar Lampung	58%	66%	71%	57%	
2	Metro	63%	73%	75%	71%	
3	Tanggamus	63%	72%	73%	-	
4	Way Kanan	70%	78%	75%	76%	
5	Lampung Timur	66%	75%	76%	71%	
6	Lampung Barat	61%	76%	75%	-	
7	Lampung Tengah	65%	73%	75%	68%	
8	Lampung Selatan	67%	75%	77%	73%	
9	Pesawaran	70%	-	79%	72%	
10	Tulang Bawang	65%	80%	75%	-	
11	Lampung Utara	70%	75%	75%		

12	Pringsewu					70,54%
13	Tulang Bawang Barat					84,80%
14	Mesuji					78,79%

Sumber: KPU.go.id diakses pada 17 Januari 2016

Pada akhirnya penelitian ini digagas guna mengacu pada urgensi media sebagai pilar keempat demokrasi. Salah satu bentuk penerapannya adalah pada pemilihan kepala daerah. Harapannya dengan adanya media yang netral maka akan muncul media yang profesional, media yang profesional akan memicu tumbuhnya proses demokratisasi di tingkat lokal

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana netralitas dan independensi surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung dalam pemberitaan pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui netralitas dan independensi surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung dalam pemberitaan kepala daerah di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian keilmuan tentang kajian komunikasi politik dan kaitannya dengan masyarakat sipil. Pada hal ini kajian mengenai netralitas pemberitaan surat kabar Lampung Post dan Radar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah di kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi media cetak dan praktisi politik dalam upaya untuk mencapai kepentingan politik dengan tidak menghilangkan kebutuhan rakyat akan media massa yang profesional dan kredibel sehingga dapat memperoleh kebenaran informasi.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat pembaca guna mewujudkan masyarakat pembaca yang cerdas dengan tidak menelan bulat-bulat informasi yang mereka dapat dari media melainkan membutuhkan selektifitas dalam rangka memperoleh kebenaran informasi sehingga akan dapat menentukan opini tanpa adanya intervensi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Massa

Media massa merupakan suatu bentuk instrumen yang lahir dari gagasan komunikasi massa. Sejarah media massa menghadapkan pada empat elemen utama yang signifikan dalam kehidupan masyarakat luas diantaranya;

“Tujuan, kebutuhan, atau penggunaan komunikasi tertentu; Teknologi berkomunikasi kepada massa dengan adanya jarak; Bentuk- bentuk organisasi sosial yang menyediakan keahlian dan kerangka untuk mengatur produksi dan distribusi; Bentuk- bentuk peraturan dan kontrol.” (MacQuail, 2010: 206)

Semua elemen tersebut saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan media sebagai perantara komunikasi di lingkungan masyarakat. Media massa memegang peranan sebagai alat komunikasi yang menjawab persoalan jarak dari satu individu dengan individu lainnya untuk dapat saling berhubungan. Media dalam hal ini tercipta dalam bentuk teknologi informasi baik dalam bentuk cetak dan elektronik.

Perwajahan media massa senantiasa mengalami dinamika yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Bentuk-bentuknya terklasifikasi berdasarkan bentuk bahannya, format dan genre, kegunaan, serta pengaturan lembaganya. Adapun bentuk-bentuk dari media massa

diantaranya; media cetak, seperti buku, surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin. Sedangkan media elektronik, seperti televisi, radio, Hand Phone, Komputer dan sebagainya

Media cetak terbagi kedalam beberapa bentuk diantaranya yaitu media cetak berbentuk buku, tabloid atau majalah dan surat kabar. McQuail (2010: 30) mengungkapkan bahwa surat kabar awal ditandai dengan kemunculannya yang berkala dengan basis komersial (dijual untuk umum) dan karakternya terbuka. Surat kabar tersebut kemudian digunakan untuk informasi, rekaman iklan, isu pengalihan dan juga gosip.

Surat kabar disebut juga sebagai *pers*. *Pers* berasal dari bahasa Belanda yang artinya cetak, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *press* yang artinya menekankan. Secara harfiah *pers* berarti cetak, sedangkan secara maknawiah diartikan sebagai penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*).

Pada perkembangannya, *pers* memiliki dua pengertian yaitu pengertian *pers* secara luas dan pengertian *pers* secara sempit. *Pers* dalam arti luas meliputi penerbitan, bahkan termasuk didalamnya media cetak elektronik. Sedangkan *pers* dalam arti sempit diartikan sebatas media cetak yaitu surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita (Effendy, 2002: 105).

Penelitian ini menggunakan salah satu bentuk media massa yaitu surat kabar karena dianggap sebagai media yang paling awal muncul namun tetap mendapatkan eksistensi hingga sekarang. Kondisi tersebut dibuktikan

sejak kemunculan pertamanya pada saat penemuan alat mesin cetak hingga saat ini adanya surat kabar tetap menjadi sumber kebutuhan akan informasi dalam lingkup internasional, nasional, dan lokal.

Secara kelembagaan, surat kabar merupakan suatu lembaga yang *independent* artinya tidak boleh ada kepentingan publik didalamnya. Pengertian tersebut membawa konsekuensi kepada media yang tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Djuroto (2000: 5) mengungkapkan bahwa secara kelembagaan surat kabar merupakan lembaga yang intensitasnya berdiri sendiri. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat tetapi bukan bagian dari masyarakat. Ia juga hidup di suatu negara tetapi bukan bagian dari pemerintah. Pada akhirnya *pers* adalah suatu lembaga kemasyarakatan

Ciri- ciri surat kabar menurut Effendy (2002: 107) dalam teori komunikasi dan filsafat komunikasi adalah sebagai berikut;

- 1) Publisitas atau penyiaran kepada publik dan khalayak, sehingga surat kabar bersifat umum, sesuai dengan kepentingan umum, dan memenuhi kepentingan umum.
- 2) Periodisitas atau periodik, terdapat kurun waktu tertentu yang menjadikan surat kabar muncul secara berkala.
- 3) Universalitas, surat kabar adalah kesemestaan isinya. Isi surat kabar berisi informasi yang bisa memenuhi kebutuhan khalayak yang berbeda-beda.

- 4) Aktualitas, yaitu menampilkan informasi yang sedang banyak diperbincangkan.

Selain dari ciri-ciri di atas, surat kabar juga memiliki fungsi tersendiri sehingga keberadaannya di tengah masyarakat membawa dampak yang mampu mengubah dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Adapun fungsi dari surat kabar menurut Effendy (2002: 105) adalah sebagai berikut;

- 1) *To inform* (informatif), yaitu fungsi surat kabar yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan berbagai peristiwa dan isu sosial yang terjadi dimasyarakat.
- 2) *To educate* (mendidik), yaitu setiap informasi yang disajikan oleh surat kabar haruslah memberikan makna bagi si pembaca. Makna keberadaan pers adalah mendidik yaitu menjadikan orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Kesemuanya merupakan salah satu upaya menuju kearah perbaikan yang positif.
- 3) *To entertain* (hiburan), kehadiran surat kabar bagi khalayak dapat diterima secara berbeda. Melalui konten yang disajikan surat kabar pada hakikatnya mampu memberikan hiburan bagi masyarakat pembaca dengan suguhan hiburan yang sehat dan menyenangkan. Hal tersebut dikarenakan dalam informasi yang disajikan memiliki karakter dan sifat yang serius (permasalahan) dan juga sifatnya menyenangkan.
- 4) *To influence* (kontrol sosial), fungsi terakhir dari pers adalah sebagai media yang melayani publik. Sebagai pelayan publik maka

pers memegang peranan penting dalam mengontrol kebijakan pemerintah dan kehidupan sosial masyarakat. Surat kabar membawa visi yaitu membenarkan dan meluruskan suatu permasalahan.

Selain itu, menurut Mahi M. Hikmat (2011: 57-59), surat kabar memiliki beberapa fungsi diantaranya;

- 1) Fungsi Ekonomi, melalui informasi dan konten didalamnya, surat kabar memberikan informasi dan pemberitaan seputar perekonomian dan peluang usaha serta peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, lebih luas pers juga berkontribusi dalam memberikan informasi terkait dengan kebijakan perekonomian pemerintah.
- 2) Fungsi Sosial, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengamanatkan bahwa pers memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud adalah dengan memberikan sikap dan gambaran terkait dengan isu sosial yang terjadi dimasyarakat.
- 3) Fungsi Mediator, peranan atau fungsi surat kabar sebagai mediator terlihat dalam permasalahan konflik dimana pers atau surat kabar menjadi penengah yang memberikan titik terang kepada kedua pihak yang berselisih paham melalui informasi yang disajikan.
- 4) Fungsi mempengaruhi, kontribusi pers dalam mempengaruhi khalayak terlihat salah satunya pada saat terjadinya pemilu. Dimana Pers atau surat kabar menjadi alat bagi partai politik untuk

mengkomunikasikan kepentingan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 5) Fungsi sejarah, keberadaan pers menjadi saksi atas berbagai peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Melalui dokumentasinya, pers dapat menghadirkan lintasan peristiwa yang telah terjadi sehingga informasinya dapat disampaikan pada masa selanjutnya.

Surat kabar dianggap berbagai bentuk inovasi yang lebih baik dari pada buku, yang dicetak, yaitu penemuan literatur, sosial, dan budaya baru. Surat kabar memiliki orientasi kepada pembaca individu dan realitas, kegunaan, sifatnya yang sekular dan cocok bagi kebutuhan kelas yang baru yaitu pelaku bisnis yang berbasis di kota kecil. Fungsi surat kabar dalam pengertian lebih lanjut menurut MacQuail (2010: 30) merupakan salah satu faktor yang dapat merubah iklim sosial politik kearah yang lebih liberal. Surat kabar kemudian dapat dikatakan sebagai sebuah perjuangan, berkembang, dan bergulat untuk tujuan kebebasan, atau sebuah sejarah perkembangan ekonomi dan teknologi yang berkelanjutan. Surat kabar terbagi kedalam beberapa bentuk diantaranya;

- 1) Surat Kabar Partai Politik, surat kabar ini dimaksudkan untuk melakukan tugas aktivasi, informasi, dan organisasi Partai Politik. Surat kabar ini merupakan alat bagi partai politik untuk melancarkan kepentingan mereka. Fungsi surat kabar adalah sebagai sarana komunikasi politik dari partai politik tertentu.

- 2) Surat Kabar Bergengsi, surat kabar jenis ini cenderung menunjukkan tanggung jawab sosial dan etika yang tinggi (dalam praktik yang secara mendasar seragam) dan surat kabar ini mendorong munculnya profesi jurnalis yang berdedikasi pada pelaporan peristiwa secara objektif. Dengan demikian, surat kabar jenis ini jauh dari pengaruh kepentingan lain dan hanya diperuntukan bagi kepentingan nasional saja.
- 3) Surat Kabar Populer, surat kabar ini dikatakan populer karena sifatnya yang benar-benar massal. Biasanya surat kabar ini dijual dengan harga yang murah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pembaca. Untuk pendapatannya, Surat Kabar Populer lebih mengutamakan kepada pendapatan iklan sehingga mereka menjual surat kabar dengan harga yang murah agar dapat dibaca oleh banyak orang. Namun, terdapat kekurangan dari pemberitaan yang disajikan cenderung dangkal, sensasional, dan tidak bertanggung jawab.
- 4) Surat Kabar Lokal dan Regional, Ciri utama dari surat kabar lokal atau regional adalah seperangkat nilai berita yang relevan terhadap pembaca lokal, memiliki pendekatan yang sifatnya dua arah (meskipun ada beberapa pengecualian) dan ketergantungan kepada sokongan dari para pengiklan lokal (MacQuail, 2010: 32-33).

Berdasarkan asumsi tersebut, kita tarik kesimpulan bahwa surat kabar lokal adalah surat kabar yang berdomisili di daerah-daerah dan berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat lokal

(daerah) dengan menggunakan konten pemberitaan sesuai dengan kebutuhan informasi di tingkat lokal (daerah).

Surat kabar dalam penelitian ini adalah surat kabar lokal yaitu surat kabar Lampung Post dan surat kabar Radar Lampung. Keduanya merupakan surat kabar ternama yang telah lama berdiri di Lampung. Keduanya merupakan surat kabar yang ditujukan kepada khalayak (*Public*). Periodesitas dari surat kabar setiap hari. Secara isi yang dimuat, surat kabar ini ditujukan kepada semua kalangan. Sebagaimana dipaparkan, surat kabar Lampung Post dan Radar Lampung telah memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana diungkapkan di atas.

Selain itu kedua surat kabar ini juga tidak melewatkan perhatian terhadap eksistensi gender, terutama kaum hawa. Hadir dengan tampilan *fashion* dan berita seputar gosip para selebriti nasional dan mancanegara telah menambah kaya komposisi isi yang ditampilkan oleh koran lokal. Seperti surat surat kabar lainnya, surat kabar Lampung Post dan Radar Lampung juga menyajikan informasi yang aktual baik seputar kedaerahan, nasional dan manca negara. Sebagai contoh adalah pada saat momentum Pemilihan Kepala Daerah di Lampung. Keduanya menyediakan kolom khusus tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah

B. Media Massa dalam Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik demokrasi memberikan ruang tersendiri bagi media massa sebagai salah satu instrumen penting yang menopang tegaknya demokrasi. Instrumen tersebut menyangkut kepada peranan dari media massa sebagai bagian dari sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala didasarkan atas prinsip persamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Young (Changara, 2009: 53) demokrasi mengandung aspek- aspek pemerataan politik, kebebasan publisitas, representasi, dan ketetapan hati yang diterima secara luas. Dalam politik harus mencakup pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan menurut hukum, memajukan individu dan kebebasan politik, serta pemilihan umum yang jujur dan bebas. Oleh karenanya, demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem politik yang ditandai dengan pemilihan yang bebas dan jujur, tetapi juga pemisahan/pembagian kekuasaan, dan penyelenggaraan kekuasaan yang diatur oleh hukum, melindungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama dan hak-hak pribadi seseorang.

Pada sistem Politik Demokratis, menurut Tymothi Cook media massa merupakan pilar keempat yang menopang demokrasi (Aisyah 2015: 8). Media massa sebagai pilar keempat demokrasi membawa konsekuensi

agar media dapat berperan mengawasi ketiga lembaga seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif.

Media massa dalam sistem politik demokrasi berbeda dengan media pada pemerintahan otoriter. Karakteristik tersebut terlihat dari sikap media yang lebih bebas. Media menjadi penyeimbang atas kekuatan pemerintah dengan aktif menyuarakan aspirasi dari masyarakat dan kritik kepada pemerintah. Berbeda dengan media massa didalam sistem pemerintahan otoriter yang menjadi corong kekuasaan pemerintah. Media tersebut anti kritik dan hanya menyuarakan yang baik- baik saja tentang pemerintah.

Pembahasan mengenai hubungan antara media dengan sistem politik demokrasi telah dituangkan dalam teori *The Theory of The Press Freedom*. Teori ini berasal dari kebebasan peran jurnalisme dalam proses politik seperti yang diungkapkan oleh para pemikir politik yaitu Thomas Paine, John Stuart Mill, Alex De Toucqueville, dan sebagainya. Tradisi Anglo-Amerika menyatakan bahwa kebebasan pers itu identik dengan gagasan kebebasan individu dan dengan filsafat politik liberal dan utilitarian. John Stuart Mill dalam bukunya menyatakan bahwa perilaku membungkam (*silencing*) opini seseorang, sama halnya dengan merampok (*robbing*).

Selanjutnya kita mengenal adanya istilah media sebagai pilar keempat penopang demokrasi atau biasa dikenal dengan sebutan "*The Four Estate*". Pendapat ini dikemukakan oleh Edmund Burk pada abad ke- 18 di Inggris yang merujuk pada kekuatan politik yang dihadapi pers. Kekuatan tersebut sering disebut dengan *Three Estate*, misalnya di Inggris yaitu raja (*lord*),

gereja (*church*), dan perwakilan rendah (*commons*). Disini pers berperan sebagai kekuatan keempat yang mengawasi ketiga kekuatan tersebut.

Cara bagi media untuk mengawasi ketiga lembaga tersebut adalah dengan memberikan ruang publik. Adapun cara bagi media dalam rangka mendukung ranah publik dapat diwujudkan dengan kriteria- kriteria berikut sebagaimana diungkapkan oleh MacQuail (2010: 201) sebagai berikut;

- 1) Memperluas ruang untuk debat
- 2) Mengedarkan informasi dan gagasan sebagai dasar untuk opini publik
- 3) Saling menghubungkan warga dengan pemerintah
- 4) Menyediakan informasi yang bergerak
- 5) Menantang monopoli pemerintah dalam hal politik
- 6) memperluas kebebasan dan keragaman publikasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, kita menarik *point* penting keterkaitan media massa dengan demokrasi. Media merupakan suatu insitusi yang dapat menunjang keberadaan demokrasi dengan menyediakan akses kepada publik (*free public sphere*) dengan demikian, media telah berperan sebagai *watch dog* anjing penjaga yang bertugas dalam mengawasi berjalannya demokrasi. Pada akhirnya media merupakan salah satu instrumen yang dapat mewujudkan *check and balancies*.

Salah satu ciri khas dari sistem politik demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan produk keluaran dari sistem demokrasi karena mengutamakan rakyat dalam menentukan pemimpin dimasa mendatang. Selain itu salah satu instrumen penting yang mendukung keberhasilan dari pemilihan umum yang demokratis adalah keberadaan media.

Sebagaimana disebutkan diatas media merupakan pilar keempat yang menegakkan demokrasi. Gagasan tersebut diutarakan karena media merupakan sumber informasi dan merupakan penyedia ruang publik yang bebas (*free public sphere*) bagi masyarakat.

Keberadaan ruang publik memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam mempertimbangkan gagasannya dari informasi yang diberikan. Akses publik yang bebas pada akhirnya akan menjauhkan masyarakat dari adanya intervensi dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam konteks pemilihan umum keberadaan media massa adalah sebagai sarana penyedia informasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pertimbangan rasional dalam memilih calon kandidat yang bersaing tanpa dimobilisasi oleh kepentingan tertentu.

Melalui pemaparan diatas, keberadaan media dan hubungannya dengan sistem pemerintahan pada akhirnya dilakukan untuk mewujudkan *good governance transparency*, dan akuntabilitas.

C. Media Massa dalam Sistem Pemilihan Umum Demokratis

Pemilihan Umum merupakan konsekuensi dari adanya sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi memungkinkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Didalamnya termasuk kepada urusan memilih pemimpin baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Heywood (2002: 229) mengatakan bahwa *election for filling office or post through choices made by a designated body of people the electorate*. Artinya bahwa pemilihan umum merupakan cara untuk memilih jabatan atau pusat kekuasaan melalui serangkaian pemilihan oleh orang-orang yang memiliki hak pilih.

Fungsi dari adanya pemilihan umum juga diterangkan oleh Heywood (2002: 231) sebagai berikut;

1. *Recruiting politician*, yaitu pemilihan umum merupakan cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu dengan adanya kandidat yang terpilih dan menduduki jabatan tertentu pada akhirnya.
2. *Making government*, setelah para kandidat tersebut terpilih maka tahapan selanjutnya adalah membuat pemerintah. Inilah yang menjadi pembeda dengan rekayasa pemilihan pada sistem politik otoriter misalnya. Jabatan politis yang biasa disebut dengan eksekutif dipilih secara bottom up (dari bawah ke-atas) yaitu masyarakat merupakan inisiator berbeda dengan sistem otoriter yang cukup dengan penunjukkan saja (*rentsiking*) oleh elite yang memiliki kekuasaan.

3. *Providing representation*, yaitu menyediakan perwakilan bagi pemilih. Para eksekutif yang telah dipilih dalam struktur jabatan yang sama dapat dikontrol oleh masyarakat melalui perwakilan mereka dilegislatif. Para legislator bertugas membawa aspirasi masyarakat dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
4. *Influencing policy*, keberadaan pemilihan umum sebagai rekayasa dalam memilih pemimpin pada akhirnya akan berdampak pula kepada produk keluaran pemerintah yaitu kebijakan.
5. *Educating voters*, yaitu serangkaian proses pemilihan membuat masyarakat menjadi belajar untuk berpolitik. Dalam proses belajar ada yang disebut dengan mengerti dan faham sehingga kemudian dapat mengambil pelajaran dari kesalahan. Pemilihan umum membuat masyarakat menjadi mengerti akan pentingnya sosok pemimpin yang dapat membawa kepada perubahan yang lebih baik. Belajar dari masa silam, mengevaluasi apa yang kurang hingga pada akhirnya menentukan pilihan.
6. *Building legitimacy*, pemilihan umum akan membangun legitimasi dari calon yang terpilih. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Dukungan mencerminkan adanya kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat yang percaya akan mudah dimobilisasi oleh pemerintah untuk mengikuti *rules* yang dibuatnya.

7. *Strengthening elites*, dengan adanya kekuasaan yang dimiliki, maka keberadaan elite akan semakin kuat.

Berdasarkan ke-tujuh kriteria tersebut, media massa sebagai pilar ke-empat demokrasi mengambil peran sebagai *educating voters* dan *building legitimacy*. Sebagai *educating voters*, media massa memberikan informasi seputar calon, pelaksanaan pemilu, dan mengajak masyarakat untuk mengambil peran dalam pemilu sebagai partisipan. *Building legitimacy*, yaitu media massa melalui iklan kampanye yang ditampilkan dan pemberitaan yang ditampilkan secara tidak langsung menciptakan popularitas calon kandidat. Semakin sering ditampilkan baik dalam bentuk iklan kampanye dan pemberitaan, maka akan menaikkan popularitas sehingga akan berpengaruh pada keterpilihan calon tersebut.

Menurut Changara (2009: 60) karakteristik pemilihan umum yang demokratis ditunjukkan dengan adanya proses pemilihan jujur bebas dan terbuka. Pengeritan tersebut sejalan dengan prinsip LUBERJURDIL (langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam mekanisme pemilihan umum di Indonesia. Disinilah keberadaan pers dalam menginformasikan pemberitaan seputar pemilihan umum sebagai sarana untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan dan calon yang akan maju pada pemilihan.

Di Indonesia Perwujudan sistem pemilihan umum yang demokratis hanya dapat tercipta dengan cara LUBERJURDIL (langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Penjelasan lebih lanjut dimana pemilihan umum yang

langsung membawa pengertian bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan dalam satu waktu. Bebas, membawa pengertian bahwa setiap orang berhak memilih siapapun yang ia kehendaki tanpa adanya intervensi atau hasutan dari orang lain. Jujur, yaitu pelaksanaan pemilihan umum harus terhindar dari kecurangan. Adil, yaitu dalam proses persaingan ditentukan dengan suara mayoritas masyarakat bukan minoritas saja.

Menurut Heryanto dan Rumaru (2013: 3) media massa dalam pemilihan umum berfungsi sebagai alat komunikasi politik berupa kampanye, membentuk opini publik, propaganda, dan publisitas. Selain itu, Shieck (2003: 8) mengatakan dalam pemilihan umum, media massa berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

Menurut Nimmo (Heryanto dan Rumaru, 2013: 86) media berfungsi juga sebagai alat untuk propaganda politik yaitu mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon kandidat tertentu. Propaganda politik dalam sistem pemilihan umum demokratis dapat dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut sebagaimana diungkapkan harus menopang berjalannya prinsip LUBERJURDIL (langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Menurut Subiyakto dan Ida (2012: 171), keberadaan media massa dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki peranan yang cukup besar dalam *political empowerment* terhadap warga negara di daerah. Menyukkseskan Pers diharapkan bukan hanya menyukkseskan dengan menyebarkan *electorate information* tentang bagaimana cara memberikan suara pada

pilkada, tetapi juga dituntut melalui pemberitaannya melakukan *voters education* yaitu pendidikan pemilih.

Media massa memberikan serangkain informasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk komitmen media dengan tanggungjawabnya terhadap kepentingan umum (masyarakat). Menurut Subiyakto dan Ida (2012: 171) media juga menjadi sarana untuk mendiskusikan tentang pentingnya pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, media massa telah mengajak masyarakat dalam rangka melakukan *watching the political process* dalam pemilihan kepala daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diketahui bahwa:

“Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah; Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945 memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (dilansir dari <http://www.kpu.tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html> yang diakses pada 22 Januari 2016)”.

Menurut Joko J. Prihantoro dalam Dhani (2009: 1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyelesaian rakyat terhadap tokoh-tokoh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/walikota, maupun bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Arti dari pengertian pemilihan kepala daerah adalah dalam

rangka memilih jajaran eksekutif yang memerintah dalam periode waktu tertentu.

Menurut Dhani (2009: 6) Pemilihan Kepala Daerah dilakukan setidaknya untuk mewujudkan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi ditingkat Politik lokal (*Political Grasshroot*), mewujudkan pemerintah lokal yang demokratis mengutamakan kepentingan dan pelayanan publik (*Local Acountability*), pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan pembangunan sosial ekonomi berbasis kebutuhan lokal (*Local responsiveness*). Ketiga hal tersebut dijadikan acuan agar pembangunan di daerah memiliki kekuatan yang kokoh.

Peran media lokal dalam mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut meliputi media sebagai sarana untuk komunikasi politik bagi para calon, membentuk opini publik, alat propaganda, dan sarana edukasi bagi masyarakat. Pengawasan media dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus menjadikan rakyat sebagai tujuan utama. Pangarusutamaan kepentingan publik disamping sesuai dengan gagasan normatif media, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana disebutkan diatas yaitu harus dapat mewujudkan partisipasi politik dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat lokal.

D. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Menurut Changara (2011: 210-2011) bahwa dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Namun ketentuan tersebut berubah sejak adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pemilihan gubernur dan bupati/walikota dipilih secara langsung. Perubahan sistem pemilihan menyebabkan semua pihak terutama kalangan politik dan elit daerah harus merubah setrategi untuk dapat mengikuti pemilihan pimpinan di daerahnya.

Sehubungan dengan pemilihan kepala daerah, Ramses (2007: 7) menyatakan bahwa demokratisasi pada tingkat nasional hanya mungkin terbangun jika demokrasi juga berlangsung pada tingkat lokal. Pernyataan tersebut mengandung pengertian tentang peranan demokrasi di tingkat lokal membawa *stimulan* bagi berjalannya demokrasi di tingkat nasional. Bila diibaratkan pada suatu kerangka tubuh manusia, maka demokrasi tingkat lokal adalah bagian tubuh yang menyusun kerangka tubuh dan bekerja sesuai dengan fungsinya menurut kerja otak. Dalam hal ini, otak diibaratkan sebagai pemerintah pusat yang mengorganisir anggota tubuh lainnya.

Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini sebagai solusi ke arah penguatan demokrasi di tingkat lokal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagaimana diungkapkan menurut Prihatmoko (2007: 53) bahwa pemilihan kepala

daerah langsung dipastikan membuka partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam memilih pemimpin di daerah. Selain itu tujuan utama dilaksanakan pemilihan umum secara langsung adalah untuk memilih pemimpin terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian dan moral yang baik.

Secara teoritis, terdapat hubungan antara partisipasi pemilihan langsung dengan demokrasi. Namun demikian, asumsi tersebut tidak langsung memberikan anggapan bahwa mekanisme pemilihan langsung berkorelasi langsung dengan demokrasi di tingkat lokal. Fenomena tersebut terjadi akibat penerapan desentralisasi yang mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan dinamika politik lokal. Menurut Ramses (2007: 11) Demokrasi tanpa desentralisasi biasanya cenderung menghasilkan otonomi pemerintah, dan bukan otonomi masyarakat di daerah.

Menurut Prihatmoko (2007: 58) pemilihan kepala daerah langsung akan memiliki makna efektif dalam mengembalikan legitimasi politik jika didukung oleh prakondisi-prakondisi sebagai berikut:

- a. Secara prosedural demokratis: mekanismenya demokratis (termasuk penetapan syarat-syarat calon, mekanisme pencalonan, dan perhitungan suara yang transparan dan adil), aturan main dalam bentuk perundang-undangan yang demokratis.

- b. Secara substantif demokrasi: terdapat ruang publik terbuka dan inklusif bagi partisipasi publik, penguatan institusi demokrasi lokal, dan dinamika politik lokal yang konkrit dan murni (tidak ada rekayasa).

Adapun landasan normatif bagi penerapan pemilihan kepala daerah langsung terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (5) yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

E. Konsepsi Netralitas dan Independensi Media

1. Teori Netralitas dan Independensi Media

Netralitas dan independensi media merujuk pada Teori Pers Tanggung Jawab Sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh McQuail (2010: 182-189) bahwa media harus mengutamakan kepentingan publik. Media yang mengutamakan kepentingan publik harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Media memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan kepemilikan media adalah kepercayaan dari publik
- b. Media berita harus jujur, akurat, berimbang, objektif, dan relevan
- c. Media harus bebas, mengatur diri sendiri
- d. Media harus mengikuti kode etik yang disetujui dari perilaku profesional. Didalam situasi tertentu, pemerintah mungkin perlu campur tangan untuk mengamankan kepentingan publik.

MacQuail menaruh perhatian terhadap gagasan normatif media. Gagasan normatif tersebut memunculkan urgensi keberadaan media sebagai bagian dari masyarakat dalam sistem politik demokrasi. Media menyediakan ranah publik melalui informasi yang bebas dari intervensi sehingga memicu partisipasi dan kontrol publik terhadap kebijakan politis dan setrategis dalam rangka membangun tatanan masyarakat sosial yang baik.

MacQuail juga berbicara mengenai pendekatan media sebagai pilar keempat penopang demokrasi. Ini merupakan salah satu bentuk kekuatan dari media. Dimana keberadaan pers dengan menunjukkan kemampuannya dalam memberikan atau menahan publisitas serta dari kapasitas informasinya. Keberadaan pers yang diperhitungkan pada waktu itu terjadi di Inggris. Sebagaimana dikemukakan Edmund Burk (MacQuail, 2010: 186) bahwa keberadaan pers setara dengan ketiga pilar penopang demokrasi yaitu Tuhan, Gereja, dan Majelis Rendah (*Lord, Church, and commons*).

Demokrasi dapat diwujudkan dengan keberadaan media yang bebas dalam berekspresi dan memberikan informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang benar, relevan, dan objektif bagi masyarakat sampai pada fungsi pengawas kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam demokrasi tidak saja diartikan sebagai kekuasaan dalam bidang pemerintah tetapi juga bidang lainnya seperti bidang ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Menurut Shieck (2003: 6)

keberadaan media yang independen akan membuat media menjalankan perannya sebagai *watch dog* dan sarana pendidikan bagi masyarakat melalui informasi yang disajikan.

Gagasan normatif MacQuail ialah bahwa media berfungsi menyebarluaskan informasi kepada publik seharusnya bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, keberagaman, kebenaran, dan kualitas informasi, mempertimbangkan tatanan sosial, dan solidaritas, serta akuntabilitas. Selain itu, media yang mengutamakan kepentingan publik juga memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu kebebasan publikasi, pluralitas kepemilikan, jangkauan yang luas, dan Keberagaman saluran dan bentuk.

Kebebasan publikasi memungkinkan bagi media untuk menyalurkan informasi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pluralitas kepemilikan, memungkinkan agar media dimiliki oleh lebih dari satu orang guna menghindari adanya kepentingan pribadi yang terafiliasi kedalam media. Jangkauan luas, mengandung pengertian media bisa diakses oleh masyarakat luas. Terakhir adalah Keberagaman saluran dan bentuk, merujuk pada konten yang disajikan oleh media sehingga masyarakat dapat memilih variasi konten sesuai dengan kehendaknya.

Tanggung jawab sosial menempatkan masyarakat sebagai obyek yang mendapatkan pengaruh dari keberadaan media. Setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak kepada sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pemilihan

kepala daerah. Para calon berusaha menampilkan citra terbaik dirinya melalui pemberitaan dan juga iklan politik. Sebagaimana diungkapkan Walter P. Lippmann (Aisyah, 2015: 14) bahwa media melalui berita merupakan sumber utama yang membentuk alam pikir kita terhadap persoalan publik yang lebih luas yang berada di luar jangkauan dan pandangan kebanyakan masyarakat biasa.

Selain teori tanggung jawab sosial, pandangan konstruktivis melahirkan adanya teori konstruksi media. Hal tersebut dikarenakan realitas yang terjadi dalam kehidupan memunculkan adanya kesenjangan antara gagasan normatif dengan kenyataan yang ada. Media menjadi alat untuk melancarkan kepentingan politik sehingga keberadaan suatu berita tidak menceritakan kenyataan sebenarnya, melainkan hanya rekayasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Peter L Berger dan Thomas Paine melalui buku *The Social construction of Reality: The Reastise in The Sociological of Knowledge*:

Menurut Berger realitas adalah:

Tidak dibentuk secara ilmiah. Tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh tuhan. Tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman dan realitas berwujud ganda/plural. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda terhadap suatu realitas berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas dengan konstruksinya masing-masing (Eriyanto, 2004: 30)

Menurut pandangan kaum konstruktivis fakta adalah konstruksi. Keberadaan suatu realitas bersifat subyektif tergantung dari pemahaman pembuatnya. Keberadaan suatu realitas pada akhirnya tidak menunjukkan perwajahan asli dari suatu fakta tetapi sebaliknya

telah termodifikasi sedemikian rupa sesuai kehendak pembuatnya (dalam hal ini wartawan atau orang yang memiliki kepentingan). Seperti yang diungkapkan Eriyanto (2002: 19) bahwa tidak ada realitas yang obyektif karena realitas tercipta oleh pandangan tertentu.

Menurut Berger (Eriyanto, 2004: 17-19) tentang konstruksi Realitas bahwa pandangan konstruksionis memandang media massa bukanlah saluran bebas, tetapi subjek yang mengkontruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Meskipun secara prosedural suatu berita telah memenuhi unsur-unsur berita, namun secara makna, berita dalam pandangan konstruksionis tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Netralitas Media

Netralitas media massa dikemukakan oleh Eriyanto (2002: 10) adalah keberimbangan (*balance*), ketidakberpihakan (*impartiality*), keadilan (*fairness*), dan objektivitas (*objectivity*). Dari konsep tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Keberimbangan (*balance*) merupakan sikap media dalam menyikapi isu, peliputan dan peristiwa- peristiwa yang diberitakan harus berimbang.
- b. Ketidakberpihakan (*impartiality*) merupakan sikap media tidak mendikte atau mengarahkan masyarakat, melainkan hanya mengungkapkan fakta saja. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap segala sesuatu tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

- c. Keadilan (*fairness*) adalah pemisahan fakta dan opini wartawan dalam mengungkapkan isu dan berita.
- d. Objektivitas (*objectivity*) adalah kesesuaian berita dengan kenyataan (*factuality*). Kenyataan (*factuality*) mengandung dua unsur yaitu benar (*truth*) dan relevan (*relevance*). Unsur benar (*truth*) ditentukan oleh ketepatan (*accuracy*) dalam mendeskripsikan fakta. Kebenaran akan kuat jika disertai akurasi pada seluruh berita (5W+1H).

Terminologi konsep netralitas dalam KBBI (2009: 301) berasal dari kata netral yang artinya tidak memihak kepada siapapun, atau tengah-tengah. Dengan demikian maka netralitas media massa cetak adalah media cetak yang tidak memihak kepada siapapun baik kepada institusi pemerintah maupun swasta.

Menurut Andrews (2008: 44) tanggung jawab besar yang dimiliki oleh media massa merupakan kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi dan memberikan teladan budaya yang bijak untuk mengubah perilaku masyarakat. Sikap tersebut sebaiknya diimbangi dengan pelaksanaan setiap fungsi media massa yang memperhatikan prinsip-prinsip yaitu *responsibilitas, freedom of the press, independence* atau netralitas, kelayakan berita terkait dengan kebenaran dan keakuratannya, aturan main yang disepakati bersama, dan penuh pertimbangan (*decency*).

3. Independensi Media

Menurut MacQuail (Widiastuti, 2012: 2) independensi media tercermin dari keterpercayaan (*reliability*), yang disampaikan kepada audience adalah yang diliput media (*originality*), dan posisi kritisnya (*critical stance*). Berdasarkan uraian tersebut maka sikap independen media secara sederhana adalah kemampuan media dalam mengungkap apa adanya suatu isu dan berita.

Pentingnya independensi media dalam suatu pemberitaan disampaikan oleh Bill Kovach dan menjadi pedoman bagi seorang jurnalis dalam bekerja. Sembilan elemen tersebut diantaranya:

- a. Kewajiban pertama jurnalis adalah kebenaran;
- b. Loyalitas pertama jurnalis adalah kepada warga (*citizens*);
- c. Esensi jurnalisisme adalah disiplin verifikasi;
- d. Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput;
- e. Jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan;
- f. Jurnalis harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari masyarakat;
- g. Jurnalis harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan;
- h. Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional;
- i. Jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani.

Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa media dikatakan independen apabila memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers (<http://www.kajianteorikodeetik.com/2015/02/kode-etik-jurnalistik.html> diakses pada 14 Mei Tahun 2016).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatakan bahwa:

- a. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga tak bersalah.
- b. Pers wajib melayani Hak Jawab
- c. Pers wajib melayani Hak Tolak

Apabila perusahaan Pers tidak melakukan fungsi dan peran dalam pasal 5 tersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) bahwa Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (<http://dpr.go.id> diakses pada 20 Mei 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila pers dalam memberitakan peristiwa dan

opini yang tidak sesuai norma-norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tak bersalah, maka pers dapat dikenakan pidana denda.

4. Netralitas dan Independensi Media

Netralitas dan independensi media menurut Jurnal Dewan Pers edisi 9 Juni 2014 memiliki pengertian sebagai sesuatu yang berimbang, akurat, dan tidak memihak kecuali kepada kepentingan publik. Netralitas disini menunjukkan bahwa media tidak berpihak dalam menyampaikan berita terutama terkait berita tentang konflik. Sedangkan independensi adalah kebebasan ruang redaksi dalam memproduksi suatu berita tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Prinsip keadilan dan berimbang menurut Changara (2009: 88) dimana Media cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh peserta pemilu. Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar keberadaan surat kabar dalam memberikan penyajian berita yang netral dan independen. Netralitas dan independensi merupakan indikator suatu surat kabar dapat dikatakan profesional. Selain itu netralitas dan independensi juga merupakan salah satu karakter organisasi dalam sistem politik yang demokratis.

Netralitas dan independensi media di Indonesia pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 bersumber dari adanya PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 Tahun 2015. Isi peraturan tersebut adalah peran media sebagai media iklan kampanye

harus memberikan prosesi yang sama baik dari segi waktu dan ukuran penyangkapan iklan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sikap yang sama bagi setiap calon (adil). Selain itu, peran media dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan dan penyiaran (<https://data.kpu.go.id/index.php#> data.kpu.go.id. diakses pada 20 Mei 2016).

Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia. Pada bab II tentang cara pemberitaan pasal 5 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia dalam menyajikan berita harus berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dibandingkan kecepatan serta mencampuradukan fakta dari opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Kode etik tersebut tersebut mengamanatkan bahwa media harus bersikap netral dan independen dalam pemberitaannya (<http://www.kajian-teori.com/2015/02/kode-etik-jurnalistik.html> diakses pada 14 Mei Tahun 2016).

Artinya kode etik jurnalistik wartawan Indonesia telah mengatur secara tegas bahwa media dalam menyajikan berita harus menggunakan prinsip netralitas yaitu media harus seimbang dalam menyajikan berita serta menjauhkan fakta dari opini wartawan. Tujuannya untuk mewujudkan kinerja wartawan agar semakin baik. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemilihan umum media yang netral adalah media yang

mematuhi konstitusi sebaliknya jika media tidak bersifat netral, maka akan melanggar konstitusi.

Menurut MacQuail (1992: 233) membagi beberapa indikator yang menggambarkan media dapat dikatakan independen dan netral.

Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemisahan fakta dengan opini

Pemisahan fakta dengan opini menyangkut kepada dimensi faktualitas yang berimplikasi kepada kebenaran. Menurut Rahayu (2006: 40) dimensi faktualitas dapat dipahami sebagai derajat kefaktualan suatu berita atau bagaimana peneliti membuktikan bahwa berita yang ditulisnya adalah fakta).

b. Tidak mengandung unsur personalisasi

Unsur personalisasi dalam pemberitaan diartikan sebagai pandangan yang melihat pemilik atau aktor politik sebagai aktor utama/penting atau tunggal yang paling berpengaruh dalam sebuah peristiwa. Personalisasi dapat dilacak dengan melihat ada tidaknya klaim peran yang berlebihan baik bernada positif maupun negatif terkait dengan pemilik atau aktor politik.

c. Sensasionalisme (emosionalisme dan dramatisasi)

Sensasionalisme diartikan sebagai sifat suka menimbulkan sensasi. Dalam penelitian ini sikap sensasionalisme dibatasi pada dua hal yaitu emosionalisme dan dramatisasi. Emosionalisme ditunjukkan dengan bentuk pemberitaan yang bernada sedih, marah, suka, tidak suka, benci, dan bentuk kata sifat lainnya yang berlebihan

tanpa mempertimbangkan rasionalitas berita. Sedangkan dramatisasi ditunjukkan dengan bentuk penyajian berita yang hiperbolik yaitu melebih-lebihkan fakta.

MacQuail (1992: 233) berpendapat bahwa dramatisasi ditunjukkan dengan aspek penempatan berita atau sudut pandang berita. Hal tersebut menyangkut kepada aspek presentasi dari suatu berita. Aspek berita yang dimaksud adalah berita-berita di suatu medium memiliki kecenderungan membesar-besarkan salah satu calon atas kontribusinya dalam suatu hal atau peristiwa, dan atau mendiskreditkan (menjelek-jelekkan) lawan politiknya.

d. *Stereotype*

Stereotype memberikan efek berupa munculnya kepercayaan, harapan, atau suatu pemikiran yang dipegang oleh seseorang tentang bagaimana menggolongkan suatu masyarakat yang kemudian informasi tersebut memiliki pengaruh pada cara bersikap/berperilaku seseorang terhadap kelompok dan anggota kelompok lain. Menurut Hamilton dan Sherman (Dewan Pers, 2014: 2) stereotype biasanya ditandai dengan adanya pemberian atribut yang mencirikan seseorang atau kelompok tertentu.

e. *Juxtaposition* dan *Linkages*

Jucta Position ditunjukkan dengan meninggikan kelebihan dari calon berupa kekayaan, kepintaran, kemampuan dan kebaikannya dengan menghubungkannya terhadap suatu hal. Keberadaan *jucta position* mengakibatkan pergeseran dua hal yang berbeda menjadi

saling berhubungan secara kontras. Sedangkan linkages merupakan upaya wartawan dalam mengandingkan dua fakta yang berbeda menjadi sama dengan maksud menimbulkan efek asosiatif yaitu berupa sebab akibat.

f. Keberimbangan dan akurasi

Narasumber seharusnya memiliki kaitan dengan tema berita, misalnya orang yang tahu/mengalami suatu peristiwa, seorang ahli/*expert* dan bukan karena berafiliasi dengan paratai politik atau pendukung calon walikota dijadikan narasumber. Menurut Dewan Pers (2014: 21), keahlian atau pengalaman menyangkut isu atau kejadian membuat penjelasan dan kesaksian yang mereka berikan memiliki nilai akurasi yang tinggi.

F. Kerangka Pikir

Peranan media massa dalam demokrasi sangat penting. Media massa dalam kerangka kehidupan demokrasi merupakan pilar ke-empat yang bertugas sebagai pengawas ke-tiga lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karenanya keberadaan media massa sebagai empat pilar penopang demokrasi dikenal sebagai *watch dog* (anjing penjaga). Media massa sebagai empat pilar demokrasi memungkinkan adanya *check and balances* terhadap kebijakan pemerintah kepada masyarakat karena adanya kritik yang disampaikan. Selain itu, media massa juga bertugas dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi yang diberikan (fungsi pendidikan) (Shieck, 2003: 8).

Cara media dalam menunjang keberadaan demokrasi adalah dengan menyediakan akses kepada publik (*free public sphere*). Adapun cara bagi media dalam rangka mendukung ranah publik dapat diwujudkan dengan kriteria- kriteria berikut sebagaimana diungkapkan oleh MacQuail (2010: 201) sebagai berikut:

1. Memperluas ruang untuk debat
2. Mengedarkan informasi dan gagasan sebagai dasar untuk opini publik
3. Saling menghubungkan warga dengan pemerintah
4. Menyediakan informasi yang bergerak
5. Menantang monopoli pemerintah dalam hal politik
6. memperluas kebebasan dan keragaman publikasi.

Salah satu karakter dari demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Menurut Subiyakto dan Ida (2012: 171), keberadaan media massa dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki peranan yang cukup besar dalam *political empowerment* terhadap warga negara di daerah. Menyukseskan Pemilu, media massa diharapkan bukan hanya menyukseskan dengan menyebarkan *electorate information* tentang bagaimana cara memberikan suara pada pemilihan kepala daerah, tetapi juga dituntut melalui pemberitaannya melakukan *voters education* yaitu pendidikan pemilih. Oleh karena media juga memiliki peranan yang signifikan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Netralitas dan Independensi adalah komponen yang harus dimiliki oleh surat kabar dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi dari surat kabar yaitu sebagai agen kontrol sosial. Dengan adanya media yang netral dan independen maka akan dapat mewujudkan sistem politik demokrasi yang baik. Yaitu media sebagai pilar keempat penopang demokrasi. Sebagai pilar keempat penopang demokrasi, media berperan dalam mewujudkan *check and balance* terhadap pemerintah dan penguasa.

Pada pemilihan umum keberadaan media yang netral dan independen merupakan salah satu sikap media dalam mendukung terwujudnya ranah publik. Penyebabnya adalah keberadaan media yang netral dan independen akan jauh dari kepetingan politik. Sehingga media akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mendiskusikan para calon dan mengawasi setiap tindakan yang menyimpang dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Netralitas dan dan independensi media di Indonesia pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 bersumber dari adanya PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 Tahun 2015. Dalam landasan tersebut, disebutkan bahwa keberadaan media dalam mengawal pemilu terdiri dari dua peran. Pertama, peran media sebagai media iklan kampanye. Media massa harus memberikan porsi yang sama baik dari segi waktu dan ukuran penayangkan iklan. Tujuannya untuk memberikan sikap yang sama bagi setiap calon (adil). Kedua, peran media dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan dan penyiaran.

Fenomena politik media yang akan dianalisis adalah fenomena tentang netralitas dan independensi media dalam pemberitaan pemilihan kepala daerah di kota Bandar Lampung. Netralitas dan independensi media merupakan suatu konsep yang digagas oleh Macquail sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkan pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat (*social responsibility*).

Netralitas dan independensi media dalam pemilihan kepala daerah tertuang dalam konstitusi. Pada mulanya gagasan ini muncul dari adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers. Selanjutnya dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemberitaan dan penyiaran juga dibahas mengenai ketentuan pemberitaan yang harus mengacu pada kode etik jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia yang menyangkut tentang keberadaan netralitas dan independensi media terdapat dalam bab II tentang cara pemberitaan pasal 5 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia dalam menyajikan berita harus berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dibandingkan kecepatan serta mencampuradukan fakta dari opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Media yang tidak netral dan independen disederhanakan dalam indikator sebagai berikut:

1. Adanya opini mengenai pemilik atau afiliasinya
2. Mengandung unsur personalisasi
3. Sensasionalisme
4. *Stereotype*
5. *Juxtaposition/ Linkages*
6. Keberimbangan dan akurasi

Mengacu pada teori normatif media dan konstruksi sosial, media massa yang netral diharapkan mengacu kepada kondisi normatif media. Media dalam pandangan normatif prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, keberagaman, kebenaran, dan kualitas informasi, mempertimbangkan tatanan sosial, dan solidaritas, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan makna netralitas dan independensi yang mempunyai makna tidak memihak dan terhindar dari intervensi.

Sebaliknya, kondisi media yang tidak netral merupakan penggambaran dari salah satu bentuk kondisi yang digambarkan pada teori konstruksi media. Asumsi tersebut didasarkan pada paradigma konstruktivis yang mengatakan bahwa media merupakan alat konstruksi sosial. Media yang dimaksud dalam pemberitaannya tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya melainkan berita telah di sesuaikan dengan pandangan tertentu.

Pada kondisi media yang tidak netral dan independen, akan berdampak pada pemberitaan yang tidak menampilkan realitas sebenarnya. Alasannya adalah keberpihakan dan adanya intervensi berkorelasi pada produk berita

yang menguntungkan pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan pada teori kontruksi media bahwa media tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya melainkan merupakan hasil kontruksi. Hal ini sesuai dengan sejumlah kasus mengungkapkan bahwa media justru bersikap tidak netral dan independen. Keberadaan media ditunggangi oleh kepentingan politik terutama pada saat pelaksanaan pemilihan umum.

Gejala tersebut dibuktikan dengan temuan-temuan kasus mengenai netralitas dan independensi media. Jurnal Dewan Pers Edisi No, 9 Juni 2014 yang berjudul “Mengungkap Independensi Media” mengungkapkan sebagian besar media massa di Indonesia dikendalikan oleh pemiliknya. Para politisi menggunakan media sebagai alat untuk memuluskan kepentingan mereka. Seperti yang terjadi di Indonesia kita melihat Surya Paloh sebagai pemilik Media Group, Aburizal Bakrie sebagai pemilik Tv One, Dahlan Iskan sebagai pemilik Jawa Post, dan Hari Tanoesoedibjo sebagai pemilik MNC Group.

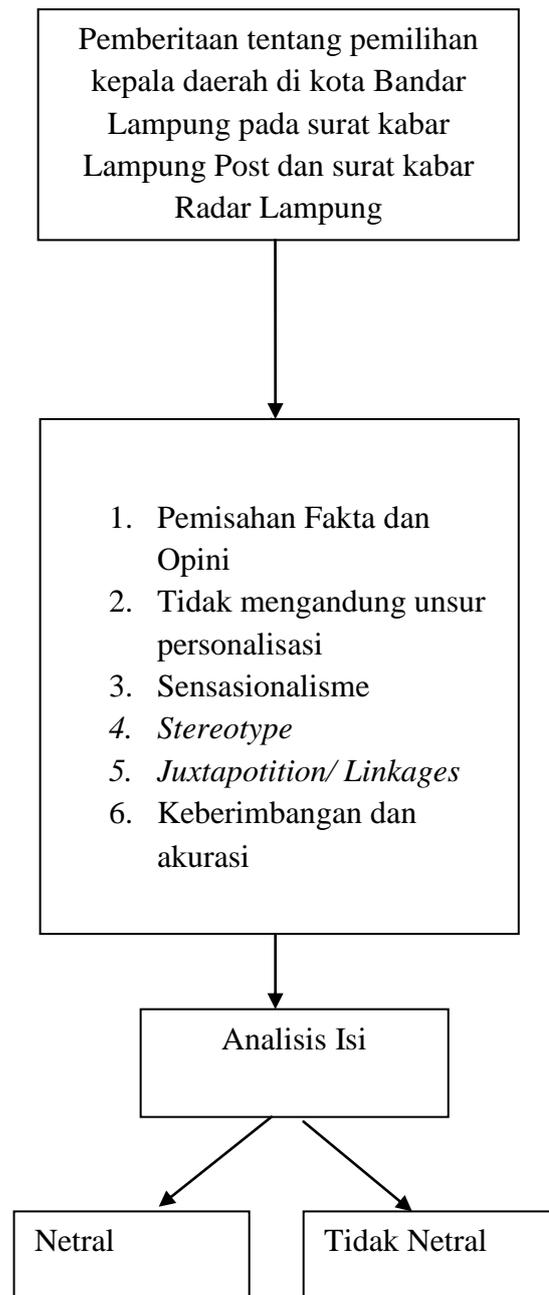
Animo media sebagai alat untuk memuluskan kepentingan politik terlihat pada masa pemilihan umum presiden dimana kesemua pemilik media tersebut membuat program seperti kuis interaktif, lagu, dan tidak jarang mempromosikan diri mereka. Pada akhirnya masyarakat dipengaruhi dengan hal-hal positif (pencitraan) yang dilakukan orang yang memiliki kepentingan politik melalui media sehingga sulit untuk melihat kebenarannya.

Kasus netralitas juga terjadi pada surat kabar nasional. Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media mengatakan:

“Sebanyak 14,29% berita di harian Sindo dari total 35 berita politik yang diteliti, cenderung berpihak kepada kepentingan partai politik atau organisasi massa. Sementara itu, berita demikian juga ditemukan di harian Kompas yaitu sebanyak 2,5% dari total 40 berita yang diteliti (<http://www.dewanpers.or.id/page/publikasi/jurnal/?id=2142> diakses pada 16 Mei 2016).”

Selain itu, keberadaan surat kabar lokal sebagai salah satu informasi utama menjadi sarana yang cukup efektif untuk melancarkan kepentingan politik pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan hasil survey The Asia Foundation (Yusuf, 2011:305), lebih dari 90% masyarakat menggunakan media sebagai sumber informasi pemilihan umum.

Kasus netralitas dan independensi media diindikasikan terjadi di Provinsi Lampung, tepatnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota Bandar Lampung Tahun 2015. Sejumlah temuan sebagaimana diungkapkan di bagian latar belakang yang meliputi adanya pemberitaan disalah satu media yang cenderung memberikan porsi yang lebih besar terhadap salah satu calon, penunjukkan simbol pada pemberitaan, dan adanya pemberitaan tentang salah satu calon tanpa memberitakan calon lain dengan nada positif. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan media menunjukkan gejala yang terdapat pada indikator netralitas dan independensi media.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Sumber: diolah sendiri oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian analisis isi deskriptif. Menurut Eriyanto (2011: 47) analisis isi deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu pesan atau suatu teks tertentu. Dalam hal ini penulis menggunakan teks berita sebagai alat untuk menganalisis fenomena sosial yang ada.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis isi. Menurut Eriyanto (2011: 47) analisis isi deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu pesan atau suatu teks tertentu. Metode Pendekatan analisis isi yaitu meneliti isi sebenarnya dari pesan dengan cara sistematis dan kuantitatif. Menurut Eriyanto (2011: 206) studi analisis isi mengidentifikasi dan menghitung kata-kata kunci, istilah dan tema pesan untuk menafsirkan yang dikatakan, bagaimana mengatakannya, perubahan dalam imbauan, dan motif yang mendasari pesan itu.

Menurut Barelson, "*Content analysis is a research technique for objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*" (Riffe, Lacy, dan Daniel, 2014: 10). Definisi tersebut

mengandung pengertian bahwa analisis isi adalah sebuah teknik penelitian yang sifatnya objektif, sistematis, dan merupakan deskripsi kuantitatif dari manifestasi pesan komunikasi.

Pada kategorisasi ini dihindarkan sebesar mungkin pengertian yang mengarah kepada pengkategorian yang memiliki nilai evaluatif dan terminologis, karena mengarah pada analisis yang sifatnya subyektif. Sistematis, berarti isi pesan yang dianalisis berdasarkan pada perencanaan yang sifatnya formal, telah ditentukan sebelumnya dan tidak memihak. Kuantitatif, berarti hasil dari analisis bisa dituangkan dalam bentuk angka-angka, sehingga pembuktian dapat dilakukan.

Manifest, berarti bahwa analisis dilakukan sesuai dengan apa yang tertulis atau tercetak dalam media yang bersangkutan, ini berarti bahwa interpretasi yang diberikan terhadap pernyataan-pernyataan yang terbuka lebih mengarah kepada suatu batasan yang relatif sesuai dengan apa adanya, bukan dalam arti pengertian yang lebih luas.

Pemilihan metode tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang diamati yaitu permasalahan netralitas dan independensi media. Selain itu penggunaan analisis isi dipilih karena penelitian ini menggunakan teks berita sebagai alat untuk menganalisis suatu fenomena sosial yaitu teks berita pada surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung. Analisis isi tepat digunakan karena sifatnya yang obyektif sesuai dengan sifat penelitian yang membandingkan dua media dan sesuai dengan karakter permasalahan dimana netralitas dan independensi merupakan suatu konsep yang berarti seimbang dan bebas.

C. Definisi Konseptual

Menurut Eriyanto (2010: 175) definisi konseptual adalah mendefinisikan konsep yang dipakai oleh ahli untuk menggambarkan atau mengabstraksi suatu gejala. Peneliti membuat konseptualisasi dari netralitas dan independensi dalam pemberitaan pemilihan kepala daerah. Berikut penjabaran dari definisi konseptual tersebut:

1. Netralitas dan independensi

Indikator netralitas dan independensi dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran MacQuail. MacQuail (1999: 233-235) menyebutkan suatu berita dikatakan netral dan independen jika memenuhi indikator- indikator tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Pemisahan fakta dengan opini. Fakta adalah bukti yang sudah terjadi di lapangan, sedangkan opini adalah sesuatu yang belum terjadi. Dengan demikian harapannya suatu pemberitaan diharapkan dapat lebih banyak mengungkapkan fakta dibandingkan dengan opini. Dalam penelitian ini kategorisasi fakta dapat dimisalkan seperti sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh calon-calon bisa dalam bentuk *track record* atau kegiatan kampanye yang dilakukan. Sedangkan opini lebih kepada hal-hal yang belum terjadi. Opini dalam pemberitaan biasanya berupa argumentasi atau pendapat seseorang.

b. Personalisasi adalah pandangan aktor politik sebagai aktor utama/penting atau tunggal yang paling berpengaruh dalam suatu

peristiwa. Personalisasi dapat ditemukan dengan melihat ada tidaknya klaim yang berlebihan baik bernada *positif* maupun *negatif* terkait dengan pemilik atau aktor politik. Personalisasi muncul ketika media melalui jurnalisnya secara tidak sengaja ataupun sengaja terlalu menonjolkan perseorangan dibandingkan peristiwanya. Unsur personalisasi menyebabkan minimnya keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi dan berimplikasi pada pembatasan pengetahuan masyarakat tentang suatu peristiwa sebenarnya (kondisi objektif).

- c. Sensasionalisme dibatasi pada unsur emosionalisme dan dramatisasi karena kedua unsur ini dianggap utama dalam mengukur ada tidaknya sensasionalisme. Sensasionalisme dalam berita diartikan sebagai suatu sifat yang suka menimbulkan sensasi. Sensasionalisme tidak dapat dibenarkan dalam karya jurnalistik yang menekankan objektivitas penyajian.

Pada pemberitaan sensasionalisme dapat dilihat dari ada tidaknya unsur emosionalisme dan dramatisasi. Sensasionalisme dapat juga diartikan sebagai penonjolan sikap emosi seperti ekspresi suka, benci, sedih, gembira, marah, kecewa yang berlebihan dibandingkan aspek logis dan rasional dalam penyajian sebuah berita.

Dramatisasi diartikan sebagai bentuk penyajian atau penulisan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta

dengan maksud menimbulkan efek dramatis bagi pembaca. Efek dramatis sengaja dibuat jurnalis untuk dapat membantu pembaca untuk lebih mengalami secara langsung peristiwa yang disajikan.

Meskipun demikian, objektivitas pemberitaan menuntut sebuah penyajian berita yang hati-hati dan mengambil jarak dengan fakta yang dilaporkan. Disamping itu, oleh karena dramatisasi termasuk dimensi netralitas lainnya lebih berkaitan dengan aspek presentasi suatu berita, maka dramatisasi juga dilihat dari penempatan dan sudut pandang berita. Lebih lanjut, aspek seperti apakah penyajian berita-berita di suatu medium memiliki kecenderungan membesar-besarkan suatu kelompok tertentu atas kontribusinya dalam suatu hal atas peristiwa, dan atau mendiskreditkan (menjelek-jelekkan) lawan politiknya juga dilihat.

- d. *Stereotype* berhubungan dengan cara pandang terhadap seseorang atau sekelompok orang dimana cara pandang tersebut kemudian melekat, menyebar, meluas dan menjadi kepercayaan orang lain sebagai sesuatu kebenaran. *Stereotype* dalam konteks pemberitaan ditandai dengan pemberitaan atribut tertentu terhadap individu atau kelompok dalam penyajian berita. Sikap *stereotype* menjadikan individu atau kelompok tertentu dalam berita sering dipersepsikan dan diperlakukan berdasarkan atribut mereka.

Atribut tersebut mungkin memiliki asosiasi yang negatif maupun positif, tetapi yang jelas tidak pernah bersifat netral atau berdasarkan

pada kenyataan yang sebenarnya. Penggunaan *Stereotype* baik yang bermakna positif maupun negatif, dalam penyajian sebuah berita dapat mengundang tuduhan keberpihakan wartawan atau media terhadap seseorang atau sekelompok yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, pemberian atribut tertentu terhadap individu, kelompok, atau instansi tertentu dalam penyajian berita utamanya dilakukan kepada lawan-lawan politik.

Pada pemberitaan, seharusnya *stereotype* dapat dihindari karena dapat mengurangi aspek objektivitas berita. Berita memiliki peran penting tidak saja memberikan informasi, tetapi juga menyebarluaskan tentang seseorang atau kelompok yang terus diangkat oleh media, bahkan mungkin akan berpengaruh kepada sikap seseorang terhadap orang lain dan atau kelompok sosial karena terjadi penyesuaian informasi yang terjadi dalam pola pikir kita agar apa yang kita pikirkan sesuai dengan (rujukan) informasi yang ada.

Efek dari adanya *stereotype* dapat ditandai dengan munculnya kepercayaan, harapan, atau suatu pemikiran yang dipegang oleh seseorang tentang bagaimana menggolongkan suatu masyarakat yang kemudian informasi tersebut memiliki pengaruh pada cara bersikap dan berperilaku seseorang terhadap kelompok atau anggota kelompok.

- e. *Juxtaposition* diartikan menyandingkan dua hal yang berbeda. *Juxtaposition* digunakan oleh wartawan untuk menyandingkan dua hal yang berbeda seolah-olah berhubungan. Tujuannya untuk

menimbulkan efek kontras atau asosiatif, yang pada akhirnya menambah kesan dramatis berita yang disajikan.

Penerapannya dalam berita politik adalah jika pemilik atau afiliasi memiliki kepentingan (seperti mencalonkan diri sebagai presiden dan atau wakil presiden), wartawan melakukan *juxtaposition* dengan cara meninggikan salah satu calon menyangkut kebaikannya, kekayaannya, kecerdasannya, dan sebagainya dengan cara menghubungkannya dengan suatu hal. Dengan demikian, *juxtaposition* dapat mengubah atau menggeser pemaknaan dua fakta yang sebenarnya berbeda (tidak berhubungan) menjadi sama (berhubungan) secara kontras.

Sementara itu *linkages* berkaitan dengan upaya wartawan untuk menyandingkan dua fakta yang berlainan dengan maksud untuk menimbulkan efek asosiatif. Media sering menghubungkan beberapa hal, baik itu aspek yang berbeda dari suatu peristiwa, cerita yang berbeda dari halaman atau media yang sama, aktor yang berbeda dengan peristiwa yang sama, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membangun kesatuan atas keragaman atau bisa juga untuk membangun *mood* tertentu. Wartawan menggunakan *linkages* untuk menghubungkan dua fakta yang sebenarnya berbeda sehingga kedua faktor tersebut dianggap (diasosiasikan) memiliki hubungan sebab akibat.

- f. Keberimbangan berita dalam penelitian ini menyangkut pada porsi yang ditampilkan dalam berita. Akurasi dikaitkan dengan narasumber

berita. Narasumber seharusnya memiliki kaitan dengan tema berita, misalnya orang yang tahu/mengalami suatu peristiwa, seorang yang ahli pada bidangnya dan bukan karena berafiliasi dengan partai politik atau pendukung calon wali kota dan calon walikota sebagai narasumber. Kriteria ini penting karena narasumber memegang peran penting dalam memberikan informasi. Keahlian atau pengalaman menyangkut isu atau kejadian membuat penjelasan dan kesaksian yang mereka berikan memiliki nilai akurasi yang tinggi.

Pada pemberitaan, mengukur akurasi juga berkaitan dengan ketepatan dalam menulis narasumber, penggunaan bahasa, penjelasan/keterangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, akurasi hanya dikaitkan dengan narasumber karena didalam berita politik persoalan ini menjadi isu penting. Dengan memenuhi kriteria tersebut maka keberadaan surat kabar akan mendukung iklim demokrasi yang ada di daerah.

2. Surat kabar

Surat kabar dalam penelitian ini ialah surat kabar lokal dan regional. Menurut MacQuail (2010: 32-33) ciri utama dari surat kabar lokal atau regional adalah seperangkat nilai berita yang relevan terhadap pembaca lokal, memiliki pendekatan yang sifatnya dua arah (meskipun ada beberapa pengecualian) dan ketergantungan kepada sokongan dari para pengiklan lokal. Surat kabar yang dimaksud ialah surat kabar Lampung

Post dan Radar Lampung. Periodeisasi dari surat kabar ini ialah harian sehingga disebut dengan surat kabar lokal harian.

3. Pemberitaan

Walter Lippman (MacQuail, 2010: 190) menfokuskan hakikat berita pada proses pengumpulan berita, yang dipandang sebagai upaya menemukan isyarat jelas. yang obyektif yang memberi arti suatu peristiwa. Dapat dikatakan bahwa berita adalah suatu peristiwa. Berdasarkan definisi tersebut maka berita yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peristiwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota Bandar Lampung tahun 2015.

D. Definisi Operasional

Pasalong (2013: 86), menyebutkan bahwa definisi operasional adalah suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional digunakan untuk mengukur, menghitung, atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Pada penelitian ini definisi operasional diterjemahkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Operasional Variabel

Variabel	Netralitas dan Independensi					
Konsep	Pemisahan fakta dengan opini	Personalisasi	Sensasionalisme	<i>Stereotype</i>	<i>Jukta position/lickage</i>	keberimbangan dan akurasi
Indikator	Fakta berupahal	Klaim bernada positif	Emosionalisme yaitu penunjuk	Adanya atribut	Jukta position, yaitu	Keberimbangan, yaitu

	yang sudah terjadi . Opini dapat berupa argum entasi atau harapan	atau negatif terhadap salah satu calon	an sikap emosi berupa rasa suka dan tidak suka, marah, dan benci. Dramatisasi, yaitu sesuatu dinyatakan secara hiperbolik (melebih-lebihkan)	salah satu calon yang disajikan dalam berita.	Mengubah atau menggeser dua fakta yang berbeda menjadi sama. Lickages, yaitu menghubungkan dua fakta yang sama sekali berbeda menjadi sama.	porsi yang diberikan sama antara satu calon dengan yang lain. Akurasi, yaitu berkaitan dengan ketepatan nara usmbe ryang dirujuk
Skala Pengukuran	Ada Tidak ada	Ada Tidak ada	Ada Tidak ada	Ada Tidak ada	Ada Tidak ada	Ada Tidak ada

Sumber: diolah sendiri oleh peneliti

E. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan melakukan pengambilan data pada kedua surat kabar yang dimulai sejak tanggal 25 Maret tahun 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini di surat kabar Lampung Post dan Radar Lampung. Dipilihnya media tersebut karena Lampung Post dan Radar Lampung merupakan koran yang menyediakan *space* khusus tentang pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung.

Pemilihan kota Bandar Lampung karena dari delapan kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Bandar Lampung adalah ibukota dari Provinsi Lampung. Sebagai ibukota Provinsi, Bandar Lampung merupakan daerah representasi bagi daerah kabupaten dan kota lainnya namun memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah. Berdasarkan data KPU tahun 2014 disebutkan bahwa tingkat partisipasi politik di Bandar Lampung rendah jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya yaitu sebesar 60%. Padahal Bandar Lampung merupakan representasi masyarakat sipil yang tinggi dengan jumlah penduduk menengah keatas tertinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya.

F. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh liputan berita seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung selama masa kampanye. Sampel dalam penelitian ini meliputi berita selama masa kampanye calon wali kota yaitu sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember tahun 2015 pada konten khusus pilkada. Sampel tersebut didasarkan pada pendapat Stephen Lacy dan Frederick Rico yaitu:

“A Sample is a subset of units from the entire population being studied. Content sampling follows the same procedural sequence as does survey sampling. In each case, there searcher must define the universe, population, and sampling frame appropriate to the researcher purpose and design. the universe includes all possible units of content being considered the population is composed of all the sampling units to which the study will infer. The sampling frame is the actual list of units from which a sample is selected.”(Lacy dan Fico, 2005: 100).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sample dalam metode analisis isi menggunakan secara general dan sesuai dengan konteks permasalahan yang ada.

G. Unit Sampel

Menurut Sugiyono (2007: 56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan rancangan sampling *nonprobabilitas* tipe sampling purposif (*purposif sampling*) untuk mengambil sampel berdasarkan periode waktu. Rancangan sampling *nonprobabilitas* adalah teknik sampling yang diambil dengan tidak menggunakan sistem acak. Sedangkan *purposif sampling* menurut Kriyantono (2012: 158) adalah teknik yang diseleksi dengan kriteria- kriteria tertentu

Alasan dipilihnya tipe tersebut adalah sampel dalam penelitian ini mengacu pada pemberitaan pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut telah diatur tentang tata cara pemberitaan tentang pemilihan kepala daerah selama masa kampanye. Dengan demikian maka hal ini sejalan dengan ketentuan sampling *nonprobabilitas* tipe sampling purposif yang diambil berdasarkan kriteria waktu dan konten yang sesuai dengan tema pemilihan kepala daerah.

Selain itu, berita kampanye yang diteliti adalah pada konten khusus pemilihan kepala daerah pada dua surat kabar yaitu Lampung Post dan Radar Lampung. Alasan pemilihan konten tersebut karena konten khusus pemilihan kepala

daerah memuat informasi secara khusus terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun dalam penelitian ini konten pemilihan kepala daerah yang akan diteliti yaitu, konten Pilkada pada surat kabar harian Radar Lampung dan konten Lampung Memilih pada harian surat kabar Lampung Post.

Jumlah populasi yang diteliti penelitian ini adalah sebagai berikut, terdapat 5 Edisi pada bulan Agustus, 30 edisi pada bulan September, 31 edisi pada bulan Oktober, 30 edisi pada bulan November, dan 5 edisi pada bulan Desember. Total keseluruhan populasi adalah sebanyak 222 edisi dari dua surat kabar yang akan diteliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer.

Data yang diperoleh dari pemberitaan surat kabar Lampung Post dan Radar Lampung selama masa kampanye. Data dikumpulkan dengan mengkliping pemberitaan seputar berita pada masa kampanye pemilihan kepala daerah di kota Bandar Lampung tahun 2015. Selanjutnya dilakukan kategorisasi dengan memasukkan kata-kata yang telah ditentukan berdasarkan indikator dan sub indikator untuk dikoding. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencatat, menyeleksi dan mengkode data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu dilakukan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.

2. Data sekunder.

Sebagai penunjang data primer, peneliti juga melakukan studi pustaka untuk memperoleh gambaran teori yang relevan dengan penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian ini ingin melihat perbedaan liputan berita antara media cetak Lampung Post dan Radar Lampung selama masa kampanye. Meskipun menganalisis perbedaan, tetapi dalam penelitian ini tidak digunakan teknik analisis data yang sifatnya kuantitatif, hal ini disebabkan sampel data tidak memungkinkan untuk dianalisis dengan metode kuantitatif. Sehingga untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang sifatnya deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan hasil pengkodean.

Adapun tahapan analisis menurut Kriyantoro (2006: 167) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan analisis isi;
2. Menetapkan kategori dan definisi kategori;
3. Menetapkan unit analisis;
4. Menyiapkan lembar koding;
5. Menetapkan populasi;
6. Melakukan pengkodean (coding);
7. Menganalisis data;
8. Kesimpulan

J. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini adalah uji validitas muka. Menurut Eriyanto (2011: 206). Validitas muka mengandung pengertian sejauh mana alat ukur benar- benar mengukur apa yang ingin diukur. Penelitian validitas muka ini dilakukan dengan menguji panel ukur yang dipakai kepada panel ahli. Peneliti mengajak orang yang memang ahli dalam bidang yang akan diteliti untuk mengukur alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Kategori ahli yang dimaksud adalah minimal memiliki pengalaman dibidang tertentu sesuai dengan konteks yang akan diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti meminta bantuan kepada pimpinan redaksi surat kabar harian Lampung Raya bapak Syaifulloh, S. Sos. Sebagai pimpinan redaksi, beliau telah memiliki pengalaman sebagai pelaku di bidang jurnalisme dan media sehingga diharapkan dapat memahami permasalahan terkait netralitas dan independensi media.

Selain itu, untuk menghindari subyektifitas peneliti, peneliti dibantu oleh dua orang koder yang masing-masing memiliki pengalaman di bidang politik dan jurnalis. Koder tersebut adalah Lintang Yunita Afriana, S. IP yang pernah memiliki pengalaman sebagai koordinator bidang riset di Laboratorium Politik Lokal dan Daerah dan Fitri Wulandari sebagai wartawan majalah kampus Teknokra Unila.

Selain itu menggunakan panel ahli, peneliti juga menggunakan pengujian data statistik menggunakan spss. Pengujian data statistik menggunakan spss digunakan mengingat terdapat kategorisasi yang perbandingan hasil kodingnya memiliki jarak yang dekat. Sehingga, dengan menggunakan uji data statistik dapat lebih menguatkan kategorisasi tersebut valid.

K. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam statistik digunakan untuk mengetahui kesalahan dalam pengukuran. Tujuan digunakannya dua orang pengkoder adalah untuk memperoleh kesepakatan atau tujuan bersama sehingga diharapkan masukan reliabilitasnya tinggi. Tentang patokan tingkat persetujuan bersama dikatakan Lasswell sebagai bahwa pemberian angka yang menunjukkan kesamaan sebanyak 70% sampai 80% antara atau diantara pelaksana koding atau analisis adalah dapat diterima sebagai keterpercayaan yang memadai (Flournoy, 1989:

33). Uji reliabilitas ini menggunakan Rumus Holsty: $CR = \frac{2M}{N1+N2}$

Penjelasan:

CR : *Coefisien Reliability*.

M : Jumlah pernyataan yang disetujui 2 pengkoding.

N1 N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding 1

dan pengkoding 2. Reliabel jika nilai $CR \geq 0,7$.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Surat Kabar Harian Lampung Post

1. Profil Lampung Post

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Lampost.co yang diakses pada 18 Agustus 2016 sejak tanggal 17 Juli 1974 berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan (MENPEN) Republik Indonesia Nomor 0148/SK/DIRJEN/PG/SIT/1974 pada tanggal 17 Juli 1974. Pada tanggal 15 April tahun 1986, berdasarkan surat Keputusan Kementerian Penerangan Republik Indonesia No.15/SK/MENPEN/SIUPP/A7/1986, PT Masa Kini Mandiri mendapatkan SIUPP yang baru dan merupakan landasan hukum baru bagi PT. Masa Kini Mandiri sebagai penerbit surat kabar harian Lampung Post. Selain itu, Lampung Post mengawali penerbitan pertamanya dalam bentuk tabloid pada tanggal 10 Agustus tahun 1974.

Pada tahun 2015, Lampung Post telah mencapai usia ke- 41 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi dinamika yang mengiringi perjalanan Lampung Post sebagai media lokal yang berdiri di Lampung. Melalui sebuah tajuk yang berjudul “Gelang Konvergensi” yang ditulis oleh wartawan Zulkarnain dituangkan sebuah refleksi yang berisi perjalanan Lampung Post selama 41 tahun. Terdapat pasang surut bahkan hampir

gulung tikar. Tercatat tiga fase perjalanan yang mengiringi keberadaan Lampung Post sebagai media lokal di Lampung.

Pertama, periode 1974-1988 merupakan fase awal berdirinya Lampung Post. Pada periode ini, Lampung Post telah berhasil mencetak 10.000 eksemplar setiap hari padahal sistem yang digunakan masih sangat sederhana yaitu dengan menggunakan sistem analog dalam pengarsipan. Selain itu, terdapat kekurangan dalam memuaskan pelanggan. Hal tersebut terlihat pada seringnya terjadi keterlambatan dalam pendistribusian surat kabar kepada pelanggan.

Fase kedua yaitu, periode 1988-1991. Pada periode ini, terlihat profesionalitas kerja yang mulai meningkat. Profesionalitas tersebut ditunjang dengan keberadaan teknologi komputerisasi yang mempermudah dalam melakukan produksi surat kabar. Pada periode ini, produktifitas juga meningkat ditandai dengan jumlah eksemplar yang semakin bertambah yaitu sebanyak 20.000 eksemplar per-hari. Pada tahun 1989, Lampung Post bergabung disalah satu unit bisnis Media Group (Media Indonesia dan Metro TV) yang dimiliki Surya Paloh.

Fase ketiga yaitu, periode 1991 sampai dengan sekarang. Lampung post telah mengembangkan sayap usaha dalam bentuk online dan juga radio. Dalam bentuk online ditandai dengan adanya website Lampost.co yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di era digital. Masyarakat juga dapat mengakses media dengan lebih cepat karena informasi yang disajikan dapat berubah bukan lagi dalam hitungan hari melainkan dalam

hitungan jam melalui website. Dalam bentuk radio bernama Sai radio yang merupakan sayap pengembangan dari Lampung Post.

2. Lampung Post Sebagai Media Lokal dan Penunjang Demokrasi di Tingkat Lokal

Surat Kabar Harian Lampung Post merupakan salah satu bentuk media massa lokal. Karakteristik utama bagi media lokal ialah kehadirannya yang mampu memberikan porsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kehadiran Lampung Post di tengah-tengah masyarakat Lampung menjadi sumber referensi bagi masyarakat pembaca di provinsi Lampung.

Sebagai surat kabar lokal, Lampung Post memberikan porsi besar terhadap pemberitaan yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah. Berdasarkan pengamatan peneliti, porsi besar terhadap kebutuhan masyarakat ditandai dengan adanya rubrik Daerah, Bandar Lampung, Wat-Wat Gawoh, dan lainnya. Selain memberikan porsi lebih terhadap kebutuhan pembaca lokal, Lampung Post juga menghadirkan rubrik yang berskala nasional bahkan internasional seperti rubrik Ragam, Bisnis Korporasi, Ekonomi dan Global.

Sebagai media lokal, Lampung Post telah tersebar hampir di seluruh Provinsi Lampung. Berdasarkan sumber Lampost.co yang diakses pada 18 Agustus 2016, Lampung post telah beredar di kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Ketersebaran tersebut menjadi penanda

eksistensi dari Lampung Post sebagai referensi bagi pembaca lokal yaitu masyarakat Lampung secara keseluruhan. Selain dari ketersebaran tersebut, Lampung Post juga memberikan porsi berita terhadap daerah-daerah setempat melalui konten Daerah.

Keberadaan Lampung Post telah menunjang iklim demokrasi di daerah. Media massa di negara demokrasi dituntut untuk berperan sebagai sarana edukasi, diskusi, pengawas lembaga-lembaga pemerintah, dan sebagai wujud ekspresi bagi masyarakat di tingkat lokal. Berdasarkan pengamatan peneliti, Lampung Post berupaya mendukung demokrasi dengan konten-kontennya.

Sebagai sarana edukasi, Lampung Post menghadirkan Bintang Pelajar, Dunia Kampus, dan Dunia Anak. Sebagai sarana diskusi, Lampung Post menghadirkan kolom opini dan surat pembaca. Sebagai pengawas institusi dan lembaga pemerintah, Lampung Post menjadi jembatan bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, menginformasikan kebijakan pemerintah, dan mengawasi kinerja mereka melalui informasi berita yang disajikan. Sebagai sarana ekspresi, Lampung Post menghadirkan rubrik seperti hiburan seperti adanya konten *Fashion* dan berita entertainment untuk menarik minat semua kalangan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, salah satu ciri khas Lampung Post dalam upaya mewujudkan demokrasi di Lampung terlihat dari keseriusannya dalam menyajikan informasi seputar politik yang disesuaikan pada momentum politik yang terjadi. Seperti pada saat pemilihan kepala daerah

tahun 2015. Rubrik Politik berganti menjadi rubrik Lampung Memilih. Lampung Memilih berisi informasi seputar pemilihan kepala daerah. Rubrik tersebut menyajikan informasi mulai dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kampanye dari para calon kandidat, informasi seputar calon, dan konflik terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Informasi yang disajikan adalah kejadian yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada tahun 2015 Lampung Post telah menyajikan informasi semua wilayah kabupaten dan kota yang mengadakan pemilihan serentak pemilihan kepala daerah tahun 2015. Keberadaan Lampung Post dalam mengawal pemilihan kepala daerah di Lampung diperkuat dengan dijadikannya Lampung Post sebagai media resmi yang tercatat di KPU sebagai sarana kampanye politik bagi para calon kandidat.

Lampung Post melalui tajuk yang berjudul Gelang Konvergensi (edisi 9 Agustus 2015) menyatakan bahwa media tersebut memegang komitmen kerakyatan dan bersikap independen. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa Lampung Post menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak memihak pada kepentingan politik tertentu. Kebenaran menjadi nilai yang selalu dituangkan dalam pemberitaan. *Tagline* yang diusung Lampung Post adalah “teruji dan terpercaya”. Lebih lanjut, Lampung Post berkomitmen berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sebagai penegak demokrasi ditujukan pula oleh Lampung Post melalui prestasinya dalam menegakkan ideologi Pancasila. Lampung Post mendapatkan penghargaan sebagai Pers Penegak Pancasila. Latar belakang diberikannya penghargaan tersebut adalah sejak awal berdirinya, Lampung Post menyatakan sikap anti terhadap paham komunis.

B. Surat Kabar Harian Radar Lampung

1. Profil Radar Lampung

Radar Lampung merupakan surat kabar lokal yang ada di Provinsi Lampung. Surat kabar Radar Lampung berkantor pusat di Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Penerbitan surat kabar pertama adalah pada tanggal 2 Februari tahun 2000. Pada tanggal 18 November tahun 2002 merupakan awal berdirinya Radar Lampung Grup.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari radarlampung.co.id yang diakses pada 17 Agustus 2016 disebutkan bahwa data Teknis terkait dengan Radar Lampung. Radar Lampung merupakan surat kabar lokal diterbitkan oleh PT Wahana Semesta Lampung. Frekuensi penerbitan adalah setiap hari kecuali pada hari libur nasional. Jumlah halaman dalam surat kabar ini adalah sebanyak 32 halaman. Surat kabar ini dicetak oleh PT. Lampung Intermedia. Berkantor pusat di Graha Pena Lampung yang beralamatkan di Jl. Sultan Agung No. 18 Kedaton Bandar Lampung yang juga merupakan perwakilan Graha Pena Jakarta.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Radar Lampung menghadirkan berbagai rubrik yang beragam kepada masyarakat pembaca. Komunikasi Bisnis,

menampilkan berita bisnis lokal dan kurs Rupiah terhadap mata uang USD. Berita Utama, menampilkan berita nasional terbaru. Society, menampilkan kegiatan dari suatu organisasi tertentu. Pilkada/Politik, menampilkan berita tentang politik dan pilkada. Metropolis, menampilkan berita dan peristiwa di Bandar Lampung. Lampung Raya, menampilkan berita dari luar Bandar Lampung. selanjutnya ada rubrik Pendidikan, X-Presi, Opini, Radar For Her dan Olah Raga/ Total Football/ Total Sport.

Berdasarkan sumber radarlampung.co.id yang diakses pada 18 Agustus 2015, pada ulang tahun yang ke-12 Radar Lampung mengganti moto dari “Selalu ada yang baru” menjadi “Satu untuk semua”. Perubahan moto tersebut menambah *performa* dari surat kabar Radar Lampung dengan diraihnya beberapa prestasi. Surat kabar Radar Lampung telah memperoleh tiga penghargaan bergengsi berupa sampul muka terbaik media cetak se- Indonesia dari Indonesia Print Media Award. Pada Tahun 2013, Radar Lampung meraih predikat sebagai Surat Kabar Harian Terbaik se-Sumatera. Radar Lampung sampai dengan tahun 2014 telah mencatat rekor sebagai koran harian yang terbit 140 halaman edisi spesial.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari radarlampung.co.id menyebutkan bahwa perolehan Prestasi Radar Lampung tidak lepas dari keberadaan talenta muda yang berbakat dan kompeten di bidangnya. Latar belakang talenta muda yang bekerja di Radar Lampung diantaranya merupakan lulusan terbaik SJI (Sekolah Jurnalistik Indonesia) Lampung. Pernyataan

tersebut menegaskan upaya mewujudkan eksistensinya dengan prestasi yang ada.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Radar Lampung turut andil dalam memunculkan kegiatan- kegiatan positif di masyarakat. Beberapa kegiatan yang menunjang seperti pengenalan jurnalistik kepada pelajar melalui *X- Presi Road to School*, dan secara periodik membuka Klinik Jurnalistik Radar Lampung. Selain itu terdapat juga kegiatan seperti arisan dengan RT- RT di Bandar Lampung, memberangkatkan RT terpilih untuk umrah, pembuatan plang nama jalan di Bandar Lampung, serta finalisasi guru favorit pada pertengahan tahun dengan hadiah berupa studi ke tiga negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand.

2. Radar Lampung Sebagai Media Lokal dan Penunjang Demokrasi di Tingkat Lokal

Media Lokal ditandai dengan keberadaannya dan kehadirannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. Keberadaan tersebut menyangkut tempat- tempat yang dijangkau oleh media, dalam hal ini surat kabar. Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan lokal, surat kabar harus memberikan porsi pemberitaan yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Seperti informasi seputar peristiwa yang ada di daerah setempat. Namun tidak dipungkiri jika dimensi lokal dan juga nasional menjadi aspek yang melengkapi perwajahan media lokal.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Radar Lampung merupakan media yang memiliki jangkauan luas. Jangkauan tersebut ditandai dengan terbitnya Radar

Lamsel (Lampung Selatan), Radar Tuba (Tulang Bawang), Radar Tanggamus, Radar Lambar (Lampung Barat), Radar Lamteng (Lampung Tengah), Radar Kotabumi (Lampung Utara), Radar Metro (Kota Metro), dan Trans Lampung kemudian Lampung Newspaper dan Senator. Radar Lampung sebagai media lokal dengan jangkauan terbesar didukung oleh keberadaan Radar Lampung TV, Radar FM Radio dan portal berita media online www.radarlampung.co.id lengkap dengan koran digitalnya atau yang dikenal dengan *e-paper*.

Media lokal sebagai sarana pendukung demokrasi ditunjukkan oleh Radar Lampung melalui *edukasi* politik dan *watch dog*. Edukasi politik ditunjukkan dengan menghadirkan pemberitaan yang memuat informasi seputar politik dan pemerintahan di daerah, nasional, dan internasional. Berdasarkan pengamatan peneliti, Radar Lampung secara rutin memberitakan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dalam rubrik Pilkada. Sebagai *watch dog* ditunjukkan dengan mengajak masyarakat untuk aktif memberikan aspirasi kepada lembaga pemerintah maupun swasta sebagai aktor dalam demokrasi.

Radar Lampung memiliki slogan “Satu Untuk Semua”. Slogan tersebut menunjukkan komitmen untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip media yang bertanggung jawab sebagaimana terdapat dalam teori *Social Responsibility*. MacQuail beranggapan bahwa keberadaan media ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Surat kabar harian Radar Lampung memiliki Visi “Menjadi Surat Kabar Terdepan Yang Jujur, Jernih Bermutu dan Paling Berpengaruh di Provinsi Lampung”. Visi tersebut juga menunjukkan terdapat komitmen kuat dalam rangka mendukung media yang transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas merupakan karakter yang terdapat dalam demokrasi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa secara visioner, Radar Lampung merupakan media yang mendukung tegaknya demokrasi di tingkat lokal.

C. Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah

Walter Lippman (MacQuail, 2010: 190) menfokuskan hakikat berita pada proses pengumpulan berita, yang dipandang sebagai upaya menemukan isyarat jelas. yang obyektif yang memberi arti suatu peristiwa. Mengacu pada pendapat tersebut, keberadaan berita menitikberatkan pada proses pemerolehannya dan pengemasan dari suatu berita. Dengan adanya kedua unsur yaitu memperhatikan proses dan kualitas maka suatu informasi dapat dikatakan sebagai berita dengan kata lain hal tersebut menunjukkan nilai dari keberadaan suatu berita.

Definisi lain dari berita menurut James A. Wollert (Sumadiria, 2005:64) adalah berita merupakan apa saja yang ingin dan perlu diketahui oleh orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Melalui pelaporan berita, media massa memberitakan informasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang mereka butuhkan. Sedangkan menurut Assegaf (Mondry, 2008: 83) berita merupakan informasi yang menarik perhatian masyarakat yang disusun sedemikian rupa dan disebarluaskan secepatnya sesuai periodisasi media.

Informasi yang ada tidak dapat langsung disebut sebagai berita, tetapi dia harus dilihat terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut mempunyai nilai berita. Nilai tersebut menyediakan standar dan ukuran bagi wartawan sebagai pedoman kerja dari praktik jurnalistik.

Sebuah berita yang mempunyai unsur nilai paling tinggi memungkinkan untuk ditempatkan dalam headline, sedangkan berita yang tidak mempunyai unsur nilai berita atau setidaknya tidak berdampak besar akan dibuang. Penentuan nilai berita ini merupakan prosedur pertama bagaimana peristiwa dikonstruksi (Eriyanto, 2011: 104). Berita yang baik hendaknya memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Akurat, suatu berita harus ditulis cermat, baik data seperti angka dan nama maupun pernyataan.
- 2) Lengkap, penulisan berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasinya dengan benar, tetapi bukan berarti menulis berita harus panjang narasinya. Efektif dan efisien merupakan indikator dari kelengkapan berita.
- 3) Kronologis, berdasarkan runtutan waktu peristiwa.
- 4) Magnitude (daya tarik), Berita yang ditulis hendaknya memiliki daya tarik tersendiri sehingga orang penasaran untuk membacanya. Hal ini berkorelasi dengan isi dari berita dan pengemasannya. Isi menyangkut peristiwa yang dikabarkan dan pengemasan bisa melalui diksi dan gaya bahasa yang dituangkan penulisnya.

- 5) Terakhir adalah berita yang disajikan harus berimbang. Tidak berat kepada salah satu pihak. Seperti yang dikatakan Mondry (2008: 141) bahwa media bersikap sebagai institusi yang netral tidak memihak.

Pemberitaan dalam penelitian ini mengacu pada pemberitaan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung. Pemberitaan pada masa kampanye. Tujuannya untuk mengetahui netralitas dari kedua surat kabar yaitu Lampung Post dan Radar Lampung. Pemberitaan pada saat kampanye dipilih dikarenakan pada momentum tersebut kebutuhan masyarakat terhadap media sangat dibutuhkan dalam rangka komunikasi politik para calon. Secara legal telah diatur dalam konstitusi yaitu PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 Tahun 2015. Konstitusi yang ada berperan sebagai pedoman dalam berkampanye.

Pemberitaan sebagaimana diungkapkan diatas adalah informasi yang menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa. Dalam pengemasannya, pemberitaan ditujukan kepada khalayak (masyarakat). Dengan adanya berita, masyarakat menjadi mengetahui permasalahan atau fenomena yang berkembang dimasyarakat. Dengan informasi tersebut memberikan manfaat sebagai sarana edukasi (pembelajaran) dan alternatif solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Adapun Pemilihan kepala Daerah merupakan praktik demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi mempunyai ciri khas yaitu partisipasi masyarakat melalui mekanisme voting. Pemberitaan tentang pemilihan kepala daerah adalah

segala bentuk informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Proses tersebut meliputi pemberitaan seputar pencalonan, kampanye, sampai dengan informasi mengenai hasil perolehan pemungutan suara.

Pada komunikasi politik, pemberitaan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan komunikasi politik para kandidat politik kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan elektabilitas (keterpilihan). Elektabilitas dapat diperoleh jika calon dapat dikenal oleh masyarakat secara luas (populer). Salah satu strategi pengenalan tersebut adalah melalui media. Baik berupa iklan maupun berita seputar calon yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Di Indonesia, penggunaan media (surat kabar) sebagai bentuk komunikasi politik terdapat pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pers.

D. Netralitas dan Independensi Media dalam Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah

Netralitas dan Independensi Media dalam Pemberitaan Kepala Daerah dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran MacQuail. Secara lebih lanjut, MacQuail (1992: 233) membagi beberapa indikator yang menggambarkan media dapat dikatakan independen dan netral. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemisahan fakta dengan opini.
- 2) Tidak Mengandung unsur personalisasi.
- 3) Sensasionalisme (emosionalisme dan dramatisasi).
- 4) *Stereotype*

5) Unsur berikutnya adalah *juxtaposition* dan *Linkages*.

6) Keberimbangan dan akurasi

Netralitas dan independensi media dalam penelitian ini ditujukan kepada pemberitaan pemilihan kepala daerah yang terjadi di kota Bandar Lampung. Adapun pemberitaan yang dianalisis bersumber dari kedua surat kabar yaitu surat kabar Lampung Post dan Radar Lampung. Ke-enam indikator tersebut dijadikan sebagai unit analisis dalam mengetahui sejauhmana netralitas dan independensi dari kedua media tersebut.

E. Analisis Isi Netralitas dan Independensi dalam Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Surat Kabar Harian Lampung Post dan Radar Lampung

Penelitian ini menggunakan teks berita sebagai obyek yang diteliti. Dimensi teks pemberitaan menyangkut kepada penampilan teks dan bahasa sehingga bentuk analisis yang digunakan adalah analisis isi. Analisis isi menurut Burhan Bungin (2014: 163) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memerhatikan konteksnya. Alasan penggunaan analisis isi karena penulis menggunakan berita pada surat kabar Lampung Post dan Radar Lampung untuk mengetahui fenomena politik media berupa netralitas dan independensi media.

Gagasan utama analisis isi dikemukakan oleh Barnard Barelson (Bungin, 2014: 163) yang mengatakan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian yang objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif. Pengertian deskripsi kuantitatif disini sebagaimana diungkapkan oleh Bungin (2014: 164)

mengandung pengertian bahwa teknik analisis isi dapat diterapkan pula dalam penelitian deskriptif.

Menurut Kriyantono (2010: 233) bahwa prinsip-prinsip analisis isi adalah prinsip sistematis, prinsip objektif, prinsip kuantitatif, dan prinsip isi yang nyata. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, analisis isi sebagai salah satu pendekatan dalam melihat fenomena politik dan sosial dalam suatu teks berita terlihat terstruktur dan menampilkan observasi untuk mengetahui perbandingan makna pesan dengan realitas yang ada. Selain itu, dengan prinsip kuantitatif, hasil dari pendekatan menggunakan analisis isi membuat adanya kepastian data berdasarkan perhitungan.

Menurut Giffin (Kriyantono, 2010: 235) studi analisis isi merupakan bentuk dukungan terhadap studi efek media massa yang dipelajari dalam mata kuliah komunikasi politik. Pesan makna yang dalam suatu teks media mengandung unsur kepentingan politis yang berdampak pada sikap politik pembacanya. Penggunaan analisis isi awalnya dilakukan dengan mengambil fenomena yang ada dimasyarakat. Pada proses pengambilan fenomena tersebut, peneliti harus merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Tujuannya agar apa yang dilakukan menjadi jelas dan terstruktur.

Selanjutnya adalah memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis. Jika objek penelitian berhubungan dengan data verbal, maka perlu disebutkan tempat, tanggal, dan alat komunikasi yang bersangkutan. Namun, jika objek penelitian berhubungan

dengan pesan- pesan dalam suatu media, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantarkan pesan itu.

Unit analisis isi adalah sesuatu yang akan diamati. Menurut kriyantono (2010: 215) unit-unit dalam analisis isi adalah sebagai berikut:

1. Unit tematik, merupakan satuan berita, perhitungannya berdasarkan tema peristiwa yan diberitakan, misalnya apa tema yang sering muncul dalam pemberitaan selama satu tahun.
2. Unit fisik, unit analisis yang perhitungannya berupa tampilan fisik seperti satuan panjang, kolom, inci, waktu dari pesan yang disampaikan.
3. Unit *reference*, yaitu unit analisi berupa rangkaian kata atau kalimat yang menunjukkan sesuatu mempunyai arti sesuai kategori. Misalnya mengukur opini tajuk sesuai kategori opini mendukung atau tidak mendukung.
4. Unit sintaksis, yaitu unit analisis yang menggunakan kata atau simbol. Penggunaannya adalah berdasarkan frekuensi kata atau simbol tersebut.

Selanjutnya, riset dengan menggunakan analisis isi adalah melakukan *coding*. Pada pemberian *coding* perlu dicatat konteks mana istilah itu muncul. Kemudian klasifikasi terhadap *coding* yang telah dilakukan. Klafikasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ditujukan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi. Kemudian, satuan makna dan

kategori analisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan komunikasi itu. Hasilnya kemudian dideskripsikan dalam bentuk *draft* laporan penelitian sebagaimana umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menggunakan analisis isi dengan unit analisis *refrence*. Unit analisis *reference* dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi sesuai dengan indikator dari netralitas dan independensi dalam pemberitaan pemilihan kepala daerah. Hasil kategorisasi tersebut lalu di bandingkan dengan rumus Holsty (Flournoy, 1989: 33), yaitu:

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan:

CR = *coeficient reliability*

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh 2 pengkoding (hakim periset).

NI, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding.

Reliabel apabila nilai $CR \geq 0,7$

Tabel 3. Analisis Isi *Reference* Netralitas dan Independensi Media

Unit Analisis	Kategorisasi berdasarkan indikator	Sub indikator
<i>Rerefence</i>	Pemisahan fakta dengan opini	Penyajian berita yang menunjukkan kenyataan sebenarnya dipisahkan dengan

		argumentasi (hal yang belum terjadi) wartawan.
	Sensasionalisme	<p>1.Emosionalisme, penonjolan sikap emosi seperti ekspresi suka, benci, sedih, gembira, marah, kecewa yang berlebihan dibandingkan aspek logis dan rasional dalam penyajian sebuah berita.</p> <p>2.Dramatisasi, membesar-besarkan suatu kelompok tertentu atas kontribusinya dalam suatu hal atas peristiwa, dan atau mendiskreditkan (menjelek-jelekan) lawan politiknya juga dilihat.</p>
	Setereotype	Pemberian atribut dalam berita yang menunjukkan salah satu calon dalam penyajian berita.
	Tidak ada personalisasi	Menonjolkan perseorangan dibandingkan peristiwanya. Atau dapat juga berupa kalimat bernada positif terhadap suatu calon dan bernada negatif terhadap lawan politiknya.

	Jucta position/ lickage	<p>1. jucta positon , mengubah atau menggeser pemaknaan dua fakta yang sebenarnya berbeda (tidak berhubungan) menjadi sama (berhubungan) secara kontras.</p> <p>2. lickage, menghubungkan beberapa hal, baik itu aspek yang berbeda dari suatu peristiwa, cerita yang berbeda dari halaman atau media yang sama, aktor yang berbeda dengan peristiwa yang sama, dan sebagainya</p>
	Keberimbangan dan akurasi	Menggunakan lebih dari satu nara sumber, ketepatan dalam menulis narasumber, penggunaan bahasa, dan penjelasan/ keterangan tentang suatu pernyataan.

Sumber: diolah sendiri oleh peneliti

Selain itu di dalam analisis isi, penulis juga melakukan kategorisasi berdasarkan indikator tentang netralitas dan independensi media dalam pemberitaan pemilihan kepala daerah di kota Bandar Lampung. Hasil

kategorisasi tersebut dijadikan sebagai unit analisis dalam mengkode (pengkodean), lalu menguji validitas data dengan menggunakan uji variabel menggunakan Rumus Holsty. Demikian penjelasan singkat mengenai analisis isi dan penggunaannya dalam penelitian ini.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang netralitas dan independensi surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung dalam pemberitaan pemilihan walikota Bandar Lampung selama masa kampanye (27 Agustus tahun 2015-05 Desember tahun 2015) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator pemisahan adanya pemisahan fakta dan opini telah dilakukan oleh kedua surat kabar tersebut. Hal tersebut berdasarkan hasil koding yang menunjukkan bahwa kedua surat kabar telah memisahkan fakta dan opini pada pemberitaan terkait pemilihan walikota Bandar Lampung selama masa kampanye.
2. Indikator personalisasi ditemukan cukup banyak pada kedua media. Hal tersebut menunjukkan bahwa media berpihak kepada salah satu calon. Dari kedua media tersebut terlihat bahwa surat kabar harian Radar Lampung memiliki kecenderungan personalisasi lebih banyak dibandingkan surat kabar harian Lampung Post.
3. Indikator sensasionalisme menunjukkan bahwa surat kabar harian Radar Lampung cenderung lebih dominan dibandingkan dengan surat kabar harian

Lampung Post terlihat dari hasil koding yang lebih banyak mengarah pada surat kabar tersebut.

4. Indikator stereotype menunjukkan bahwa surat kabar harian Radar Lampung memiliki kecenderungan lebih banyak dibandingkan dengan Lampung Post.
5. Indikator *Jucktaporation/linkage* juga menunjukkan bahwa surat kabar harian Radar Lampung memiliki kecenderungan lebih banyak dibandingkan dengan surat kabar harian Lampung Post.
6. Indikator Keberimbangan dan akurasi menunjukkan bahwa kedua media cukup memenuhi indikator ini. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah berita yang terindikasi tidak berimbang dan akurat. Namun terkait dengan perbandingan antara kedua media, surat kabar Radar Lampung cenderung lebih banyak terindikasi tidak berimbang dan akurat dibandingkan dengan surat kabar harian Lampung Post.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua surat kabar terindikasi tidak netral dan independen karena dari keenam kategori, lima diantaranya memenuhi indikator yang telah dibuat. Adapun terkait perbandingan dari kedua media tersebut, surat kabar harian Lampung Post cenderung lebih netral dan independen dibandingkan surat kabar harian Radar Lampung dikarenakan semua persentase indikator lebih banyak diperoleh Radar Lampung. Namun, kedua surat kabar ini memiliki kesamaan dalam keberpihakan terhadap salah satu calon yang maju pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015. Kedua surat kabar menunjukkan keberpihakan kepada Herman H.N.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tidak mudah dalam mewujudkan netralitas dan independensi media cetak dalam melaksanakan fungsinya yaitu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui pemberitaan kampanye pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015.

Untuk itu, media seharusnya dapat bersikap profesional agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu. Proposional dalam menyajikan berita agar dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, kontrol dan perekat sosial dalam membangun budaya demokrasi yang baik. Secara lebih lanjut penelitian ini menjadi masukan kepada sejumlah pihak diantaranya:

Surat kabar Lampung Post dan Radar Lampung sebagai media massa yang memiliki kewajiban informasi kepada masyarakat luas, seharusnya mampu memberikan informasi yang netral dan independen.

Masyarakat sebagai konsumen berita lebih selektif dapat memilih berita dan menjadikannya sebagai rujukan untuk menentukan suara pada pemilihan umum. Pemerintah dalam hal sejumlah instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Terutama Panwaslu agar lebih tegas dalam menindak adanya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Terutama pelanggaran terhadap media sebagai sarana kampanye bagi para calon yang maju dalam pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2014. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana
- Changara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi)*. Jakarta: Rajawali Press
- DjuROTO, Toto. 2000. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: Penerbit Remaja
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- _____. 2004. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- _____. 2011. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____. 2013. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Flournoy. 1989. *Quantitatif In Vitro Lithotripsy Of Gallstone*. North Carolina: Duke University
- Heryanto, Rumar. 2013. *Komunikasi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Heywood, Andrew. 2002. *Politics: Second Edition*. New York: Palgrave
- Kovach, Bill & Tom Rosentiel. 2001. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Pantau
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktisi Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- MacAndrews, Colin. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- MacQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest*. New Delhi: Sage Publication
- _____. 2010. *Teori Komunikasi Massa Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika
- _____. 2010. *Teori Komunikasi Massa Buku 2*. Jakarta: Salemba Humanika
- Manurung, Dkk. 2014. *Komunikasi dan Kekuasaan*. Jakarta: Forum Studi Komunikasi Fisip Universitas Atmajaya Yogyakarta
- M. Hikmat. Mahi. 2011. *Etika & Hukum Pers*. Bandung: Batic Press Bandung
- Maras. 2013. *Objectivity In Journalism*. Cambridge: Polity
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktik jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nimmo. 2001. *Komunikasi Politik:Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Oetama, Jakob. 2001. *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Pasalong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prihatmoko, Joko J. 2007. *Mendemokratiskan Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press
- Rahayu. 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Media & Budaya Populer Dewan Pers
- Ramses, Andi. 2007. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rineka Cipta
- Riffe, Daniel, Fico. 2014. *Analyzing Media Messages (Using Kuantitatif Content Analysis in Research)*. New York And London: Routledge
- Rivers. William L. Jay W. Jansen, dan Theodore Peterson. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta Prenada Media
- Shafaat, Idriss. 2008. *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Subiyakto, Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Goup
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatid dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumadiria, Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis*. Jakarta. Rineka Cipta

Yusuf, Ahmad Muklis. 2011. *Keberpihakan Pers pada Politisi dan Pengaruhnya Terhadap Berita*. Jakarta: Rajawali Press

Dokumen

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2009. *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Penerbit Yrama Widiya Tama

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Aisyah. 2015. *Politik Media Dalam Konflik Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Analisis Framing Pada Pemberitaan Metro Tv dan Tv One)*. Universitas Lampung

Dewan Pers. 2014. *Menakar Independensi dan Netralitas Media*. Volume 9

Dhani. 2009. *Pilkada dalam Tinjauan Hukum*. Universitas Indonesia

Dhanurseto. 2009. *Pemberitaan Media Cetak Dalam Kampanye Presiden Tahun 2009*. Universitas Brawijaya

Heychael, Muhamad. 2014. *Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014*. Remotivi.

Parangin-angin, Loina Lalolo K. 2004. *Perempuan Dalam Berita Kampanye Pemilu 2004 di Media Cetak Nasional*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia

Pontarie. 2015. *Komparasi Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan dan Netralitas Dalam Pembertiaan (Studi Konten Analisis Terkait Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 di Harian Kompas dan Koran Sindo)*. Yogyakarta Peneliti Komunikasi dan Media pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta.

Schieck, Frederick W. 2003. *Independent Media's Role In Building Democracy*. Global, Vol. 8, Number 1.

Widiastuti. 2012. *Independensi Media Sebagai Institusi Free Public Shere*. Jakarta. Universitas Bakrie

Internet

<https://data.kpu.go.id/index.php#> data.kpu.go.id. diakses pada 20 Mei 2016 Pukul 00.00 wib

<http://digilib.unila.ac.id/10401/16/BAB%20III.pdf> diakses pada 19 Mei 2016 pukul 22.05 wib

<http://digilib.uinsby.ac.id/7495/4/bab%203.pdf> diakses pada 19 Mei 2016 pukul 11.00 wib

<http://dpr.go.id> diakses pada 20 Mei 2016 pukul 23.00 wib

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123506-S-5277-Analisis%20isi-Methodologi.pdf> diakses pada 19 Mei 2016 pukul 22.00 wib

<http://www.dewanpers.or.id> diakses pada 20 Desember 2015 pukul 22.00 wib

<http://www.kajianteorikodeetik.com/2015/02/kode-etik-journalistik.html> diakses pada 14 Mei Tahun 2016 pukul 22.00 wib

<http://www.kpu-tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html>.

[www. Lampost.co](http://www.lampost.co) diakses pada 17 Agustus 2016 pukul 22.00 wib

[www. Lampost.co](http://www.lampost.co) diakses pada 18 Agustus 2016 pukul 15.00 wib

[www. Radarlampung.co.id](http://www.radarlampung.co.id) diakses pada 17 Agustus 2016 pukul 23.00 wib

Surat Kabar

Lampung Post, Edisi 9 Agustus 2015

Radar Lampung, Edisi 1 Desember 2015

Radar Lampung, Edisi 3 Desember 2015